



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBNKITA

KINERJA DAN FAKTA



DESEMBER | 2024

Foto:
Storypost - Ikhsan Hadi Ardiansyah

Aktivitas produksi
dan konsumsi
masyarakat masih
tetap kuat.

Foto Storypost - Adnan Rizka W



Terima kasih pembaca. Sampaikan kritik dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas publikasi APBN KiTa dengan scan barcode di bawah ini:



atau klik tautan di bawah ini:

<https://forms.office.com/r/XtsDeF87BD>

Scan dan Unduh
APBN KITA



ISSN link
APBN KiTa



www.kemenkeu.go.id/apbnkita



“APBN akan terus menjadi instrumen yang sangat penting dan diandalkan untuk menjaga ekonomi dan masyarakat, dan juga untuk mewujudkan program-program prioritas nasional dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran”.

Sri Mulyani Indrawati

Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. **Pelindung:** Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. **Pengarah:** Pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu **Penanggung Jawab:** Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan Redaksi:** Tim Deputies Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim Teknis Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan, Tim Redaksi Penyusun Publikasi APBN KiTa. **Editor:** Tim Editor Penyusun Publikasi APBN KiTa **Desain Grafis, Layout dan Foto:** Biro KLI Kementerian Keuangan. Alamat Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

Foto: Kemenkeu - Resha Aditya



Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	9
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO	17
Postur APBN	21
Penerimaan Perpajakan	25
Penerimaan Kepabeanan & Cukai	33
Penerimaan Negara Bukan Pajak	39
Belanja Pemerintah Pusat	45
Transfer ke Daerah	51
Pembiayaan Utang	57
<i>Calendar Events 2024</i>	62
Laporan Khusus	66

Glossarium

Alutsista	: Alat Utama Sistem Persenjataan
Almatsus	: Alat Material Khusus
AP	: <i>Administered Price</i>
APBN	: Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: <i>The Association of Southeast Asian Nations</i>
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bansos	: Bantuan Sosial
Bapanas	: Badan Pangan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BI	: Bank Indonesia
BK	: Bea Keluar
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BLU	: Badan Layanan Umum
BM	: Bea Masuk
BMN	: Barang Milik Negara
BPJS	: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
BPS	: Badan Pusat Statistik
bps	: basis points
BUK	: Bank Umum Konvensional
BUS	: Bank Umum Syariah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CAR	: <i>Capital Adequacy Ratio</i>
CDS	: <i>Credit Default Swap</i>
CHT	: Cukai Hasil Tembakau





IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
ICP	: Indonesia <i>Crude Price</i>
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
K/L	: Kementerian/Lembaga
KI	: Kredit Investasi
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KI	: Kredit Konsumsi
KKB	: Kredit Kendaraan Bermotor
KLCI	: Kuala Lumpur Composite Indeks
KMK	: Kredit Modal Kerja
KND	: Kekayaan Negara Dipisahkan
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
KPR	: Kredit Pemilikan Rumah
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara
LNPR	: Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga
LPG	: <i>Liquefied Petroleum Gas</i>
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Migas	: Minyak dan Gas Bumi
mtm	: <i>Month to Month</i>
MTN	: <i>Medium Term Note</i>
NDA	: <i>Net Domestic Asset</i>
NFA	: <i>Net Foreign Asset</i>
NFB	: <i>Net Foreign Buy</i>
NIM	: <i>Net Interest Margin</i>
NPI	: Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	: <i>Non-performing Loan</i>



Penerimaan Pajak	1.688,93
Penerimaan Bea & Cukai	257,75
Penerimaan Negara Bukan Pajak	522,41
Penerimaan Hibah	23,61
Belanja Kementerian/Lembaga	1.049,72
Belanja Non Kementerian/Lembaga	1.048,93
Transfer ke Daerah	795,82

Ringkasan Eksekutif

Ketidakpastian prospek ekonomi dan perdagangan global cenderung meningkat. Perubahan pemerintahan di Amerika Serikat diperkirakan akan meningkatkan risiko, terutama menekan perdagangan dan pasar keuangan global. Kondisi ekonomi Tiongkok yang masih lemah juga menambah tekanan terhadap *emerging markets*. Perkembangan aktivitas manufaktur global di November 2024 meningkat yang digambarkan oleh *purchasing managers' index* (PMI) manufaktur pada level 50, lebih tinggi dari level sebelumnya 49,4. Perkembangan harga komoditas global masih berfluktuasi yang didorong oleh eskalasi geopolitik, memengaruhi ekspektasi suplai dan



Perkembangan aktivitas manufaktur global di November 2024 meningkat yang digambarkan oleh *purchasing managers' index* (PMI) manufaktur pada level 50, lebih tinggi dari level sebelumnya 49,4.

permintaan, terutama komoditas energi. Perekonomian nasional di kuartal IV 2024 tetap akan tumbuh kuat didukung oleh komponen permintaan domestik dan peran APBN akan dioptimalkan.

Pajak

Hingga akhir November 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp2.492,70 triliun atau telah mencapai 88,95 persen dari target pada APBN 2024¹, yang secara nominal lebih tinggi Rp31,71 triliun atau tumbuh 1,29 persen (yoy). Realisasi komponen pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan telah mencapai Rp1.946,68 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp522,41 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp23,61 triliun. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan telah tumbuh 1,66 persen (yoy), sedangkan PNBP berkontraksi 4,01 persen (yoy). Sementara itu, capaian masing-masing komponen pendapatan negara tersebut terhadap target, yaitu perpajakan 84,28 persen dan PNBP 106,18 persen.

Realisasi penerimaan Perpajakan bersumber dari Penerimaan Pajak yang tercatat Rp1.688,93 triliun serta Kepabeanan dan Cukai Rp257,75 triliun. Kinerja penerimaan Perpajakan yang tumbuh positif tersebut didorong oleh kinerja pajak yang telah kembali ke zona positif dengan pertumbuhan 1,14 persen (yoy), serta kinerja Kepabeanan dan Cukai yang terus tumbuh 5,20 persen (yoy). Realisasi penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai masing-masing telah mencapai 84,92 persen dan 80,30 persen terhadap target. Kinerja perpajakan periode ini lebih dipengaruhi oleh faktor penurunan restitusi dan kebijakan optimalisasi penerimaan, serta kinerja cukai dan pajak internasional yang terus memberikan kontribusi secara positif terhadap kinerja perpajakan.

Secara nominal, penerimaan Pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas Rp885,77 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) Rp707,76 triliun. Kontribusi kedua komponen penerimaan Pajak tersebut terhadap total penerimaan Pajak masing-masing mencapai 52,45 persen dan 41,91 persen. Secara lebih detail, PPh Nonmigas berdasarkan nominal penerimaannya masih ditopang oleh tiga komponen terbesar, yaitu PPh Pasal 25/29 Badan (PPh Badan), PPh Pasal 21, dan PPh Final, yang berkontribusi mencapai 71,94 persen terhadap total penerimaan PPh Nonmigas. Berdasarkan pertumbuhannya, PPh Nonmigas hingga akhir November 2024 masih berkontraksi tipis 1,96 persen (yoy), lebih rendah dari periode bulan sebelumnya. Meskipun PPh Nonmigas berkontraksi, namun kinerja dua komponen utamanya yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Final tumbuh cukup signifikan. Pertumbuhan masing-masing tercatat 21,98 persen (yoy) dan 12,09 persen (yoy). Sementara itu, komponen PPh Nonmigas dari penerimaan PPh Badan kinerjanya masih berkontraksi yang tercatat 23,12 persen (yoy). Meskipun begitu, kontraksi PPh Badan tersebut lebih rendah dibandingkan kontraksi pada periode bulan sebelumnya. Kinerja PPh Badan tersebut masih menjadi faktor utama yang menyebabkan kinerja PPh Nonmigas masih berkontraksi. Pelambatan kinerja PPh Badan terutama disebabkan oleh faktor restitusi sebagai dampak moderasi harga komoditas di 2023, meskipun pertumbuhan restitusi menurun secara signifikan di periode ini. Namun demikian, kinerja PPh Badan terus membaik yang terlihat dari semakin kecil kontraksi yang terjadi setiap bulan. Di sisi yang lain, peningkatan kinerja penerimaan PPh Pasal 21 masih dipengaruhi oleh faktor utilisasi dan upah tenaga kerja. Sementara kinerja

1. Persentase terhadap target dan pagu mengacu pada APBN 2024



**Hingga akhir
November 2024,
capaian penerimaan
Kepabeanaan dan
Cukai bersumber dari
penerimaan Cukai
Rp192,73 triliun, Bea
Masuk (BM) Rp47,72
triliun, dan Bea Keluar
(BK) Rp17,30 triliun.**

dari PPh Final masih tumbuh yang didukung oleh peningkatan penerimaan sejalan dengan kenaikan aktivitas transaksi dan ekonomi yang membaik. Selain itu, kinerja PPh Nonmigas juga didukung oleh penerimaan dari mayoritas komponen PPh Nonmigas lainnya yang konsisten tumbuh positif, seperti PPh Pasal 26, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi (PPh OP).

Lebih lanjut, secara nominal, realisasi penerimaan Pajak yang bersumber dari penerimaan PPN/PPnBM ditopang utamanya oleh penerimaan dari PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor dengan kontribusi masing-masing sebesar 61,42 persen dan 34,85 persen terhadap total penerimaan PPN/PPnBM. Kinerja penerimaan PPN/PPnBM secara kumulatif tumbuh menguat 6,11 persen (yoy). Pertumbuhan

yang baik tersebut didorong oleh PPN DN yang tumbuh 6,95 persen (yoy) dan PPN Impor yang tumbuh 6,59 persen (yoy). Kinerja PPN DN terutama dipengaruhi oleh peningkatan setoran dari sektor perdagangan dan industri pengolahan, serta restitusi yang mulai menurun. Sementara, PPN Impor tumbuh baik secara kumulatif didorong oleh transaksi impor sub sektor perdagangan besar mesin, bahan kimia, dan bahan bakar.

Hingga akhir November 2024, capaian penerimaan Kepabeanaan dan Cukai bersumber dari penerimaan Cukai Rp192,73 triliun, Bea Masuk (BM) Rp47,72 triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp17,30 triliun. Lebih detilnya, realisasi penerimaan Kepabeanaan dan Cukai terutama bersumber dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang berkontribusi mencapai 71,52 persen terhadap total penerimaannya. Berdasarkan pertumbuhannya, kinerja penerimaan Kepabeanaan dan Cukai tumbuh di semua komponen penerimaannya, dimana cukai tumbuh 2,83 persen (yoy), sementara kepabeanaan (BM dan BK) kinerjanya juga tumbuh masing-masing 4,02 persen (yoy) dan 47,87 persen (yoy). Hingga akhir November 2024, kinerja penerimaan CHT masih dipengaruhi terutama oleh kenaikan produksi rokok golongan II dan III, meskipun produksi golongan I masih menurun. Selanjutnya, kinerja BM lebih dipengaruhi oleh penguatan nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah dan kenaikan nilai impor. Di sisi lain, kinerja BK yang masih meningkat signifikan didorong oleh faktor kebijakan relaksasi ekspor mineral tembaga mentah, serta BK produk sawit yang meningkat akibat peningkatan rata-rata harga CPO.

PNBP

Realisasi PNBP sampai akhir November 2024 mencapai Rp522,41 triliun atau 106,18 persen terhadap target. Kinerja PNBP tersebut berkontraksi 4,01 persen (yoy) terutama disebabkan oleh tekanan pada PNBP yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) dan PNBP lainnya, sedangkan PNBP KND dan PNBP BLU meningkat.

Kinerja Pendapatan SDA mencapai Rp211,78 triliun atau 101,98 persen dari target. Capaian pendapatan SDA tersebut berkontraksi 10,22 persen (yoy) yang disebabkan oleh pendapatan SDA Migas yang berkontraksi 4,47 persen (yoy) dengan realisasi Rp104,09 triliun. Hal ini merupakan dampak penurunan *lifting* migas akibat *on stream* yang tertunda, penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua. Selain itu, kinerja pendapatan SDA Nonmigas juga berkontraksi 15,16 persen (yoy)

terutama dipengaruhi oleh dampak moderasi harga batubara, meskipun volume produksi batubara meningkat.

Realisasi PNBP yang berasal dari KND mencapai Rp86,38 triliun atau 100,62 persen dari target. Kinerja PNBP KND tersebut tumbuh 5,93 persen (yoy) terutama berasal dari pembayaran deviden perbankan atas peningkatan kinerja keuangan khususnya dari Bank Himbara.

Realisasi PNBP yang berasal dari pendapatan BLU mencapai Rp88,78 triliun atau tumbuh 10,84 persen (yoy). Pertumbuhan kinerja PNBP BLU tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan BLU yang disumbang dari jasa pelayanan Rumah Sakit, Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, Pendapatan Pengelolaan Dana BLU serta Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU.

Sementara itu, PNBP Lainnya terealisasi Rp135,46 triliun atau berkontraksi 7,67 persen (yoy). Capaian kinerja PNBP Lainnya tersebut disebabkan oleh PNBP PHT yang berkontraksi 22,01 persen (yoy) karena dampak moderasi harga batubara. Selain itu, pelambatan juga berasal dari PNBP K/L yang berkontraksi 3,11 persen (yoy) terutama disebabkan pendapatan nonlayanan yang sifatnya tidak berulang pada Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir November 2024 mencapai Rp2.894,47 triliun, 87,05 persen terhadap pagu atau tumbuh 15,29 persen (yoy). Realisasi belanja tersebut terdiri atas Belanja Pusat Rp2.098,65 triliun dan TKD Rp795,82 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 18,27 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh peningkatan



Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 18,27 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh peningkatan realisasi belanja modal yang tumbuh 29,62 persen (yoy).

realisasi belanja modal yang tumbuh 29,62 persen (yoy) antara lain karena peningkatan belanja infrastruktur dan pengadaan alat utama sistem senjata. Selain itu, realisasi belanja barang tumbuh 23,12 persen (yoy) antara lain untuk pemantapan ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penyelenggaraan Pemilu 2024. Selanjutnya, realisasi belanja bansos lebih rendah 1,42 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako yang melalui PT Pos (periode Juli s.d. November) belum disalurkan.

Subsidi

Realisasi belanja subsidi sampai dengan 30 November 2024 mencapai Rp244,14 triliun. Realisasi belanja subsidi energi mencapai Rp157,16 triliun, tumbuh 16,96 persen (yoy). Sementara itu, realisasi subsidi nonenergi tercatat Rp86,98 triliun atau tumbuh 28,12 persen (yoy).

Realisasi subsidi energi sampai dengan 30 November 2024 tercatat Rp157,16 triliun atau 83,11 persen dari pagu atau naik 16,96 persen (yoy). Seperti halnya pada periode-periode sebelumnya, subsidi energi mayoritas berasal dari subsidi BBM dan LPG dengan besaran Rp92,98 triliun atau 82,09 persen dari pagu, dengan rincian subsidi BBM yang terdiri atas Solar Rp15,73 triliun dan Minyak Tanah Rp4,17 triliun. Sedangkan untuk subsidi LPG 3 kg yakni Rp73,08 triliun atau 83,57 persen dari pagu. Selain itu, subsidi energi juga berupa subsidi listrik, Rp64,18 triliun atau 84,64 persen dari pagu. Apabila dilihat dari tahun ke tahun, baik subsidi BBM dan LPG 3 kg serta subsidi listrik tercatat tumbuh. Pada periode November ini, subsidi BBM dan LPG 3 Kg tumbuh 18,90 persen (yoy) sedangkan subsidi listrik tumbuh 14,26 persen (yoy). Hal ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat yang kian meningkat



Apabila dilihat dari tahun ke tahun, baik subsidi BBM dan LPG 3 kg serta subsidi listrik tercatat tumbuh. Pada periode November ini, subsidi BBM dan LPG 3 Kg tumbuh 18,90 persen (yoy) sedangkan subsidi listrik tumbuh 14,26 persen (yoy).

seiring dengan perekonomian pasca pandemi Covid-19 yang membaik.

Realisasi subsidi nonenergi sampai dengan 30 November 2024 tercatat Rp86,98 triliun, 89,79 persen dari pagu atau naik 28,12 persen (yoy). Sejalan dengan tren pada kuartal sebelumnya, realisasi tersebut didominasi oleh subsidi kredit program Rp38,16 triliun atau 43,88 persen dari total realisasi subsidi nonenergi. Mayoritas realisasi subsidi kredit program disalurkan kepada subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat, yaitu Rp33,75 triliun atau turun 2,32 persen (yoy). Selanjutnya, subsidi pupuk menjadi kontributor terbesar kedua dari subsidi nonenergi dengan realisasi Rp35,99 triliun atau meningkat 103,30 persen (yoy). Sampai dengan 30 November 2024, pemerintah melalui PT Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk sebanyak 6,71 juta ton, atau naik 17,72 persen (yoy). Selain itu, realisasi

subsidi PSO mencapai Rp4,97 triliun atau naik 52,31 persen (yoy), dan realisasi subsidi pajak mencapai Rp7,86 triliun atau naik 5,88 persen (yoy).

TKD

Realisasi TKD sampai dengan 30 November 2024 mencapai Rp795,82 triliun, 92,80 persen dari pagu, atau tumbuh 8,11 persen (yoy). Secara umum, peningkatan realisasi TKD terutama ditopang oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp417,83 triliun, lebih tinggi Rp47,06 triliun atau 12,69 persen (yoy) karena kenaikan realisasi penyaluran DAU *Block Grant* dan kepatuhan pemerintah daerah (pemda) dalam memenuhi syarat salur.

Realisasi beberapa jenis TKD lainnya juga naik sejalan dengan peningkatan kepatuhan Pemda dalam memenuhi syarat salur. Secara lebih rinci, jenis TKD tersebut yaitu: 1) Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp128,44 triliun, lebih tinggi Rp10,26 triliun atau tumbuh 8,68 persen (yoy); 2) DAK Fisik terealisasi Rp39,54 triliun, lebih tinggi Rp0,19 triliun atau tumbuh 0,48 persen (yoy); 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik terealisasi Rp118,72 triliun, lebih tinggi Rp2,42 triliun atau tumbuh 2,08 persen (yoy); 4) Dana Desa terealisasi Rp69,17 triliun, lebih tinggi Rp3,99 triliun atau tumbuh 6,12 persen (yoy); 5) Insentif Fiskal terealisasi Rp6,05 triliun, lebih tinggi Rp0,05 triliun atau tumbuh 0,81 persen (yoy); dan 6) Dana Keistimewaan DIY terealisasi Rp1,42 triliun, lebih tinggi Rp0,05 triliun atau tumbuh 3,44 persen (yoy). Realisasi Dana Keistimewaan DIY tersebut telah mencapai 100 persen dari pagu.

Sementara itu, Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Hibah kepada Daerah mencatatkan penurunan realisasi. Dana Otsus terealisasi Rp14,07 triliun, lebih rendah Rp3,18 triliun atau kontraksi 18,42 persen (yoy).

Sedangkan Hibah kepada Daerah mencatatkan realisasi Rp0,60 triliun.

Defisit & Pembiayaan

Keseimbangan Primer sampai dengan 30 November 2024 tercatat positif Rp47,07 triliun atau 0,21 persen terhadap PDB. Sementara itu, defisit cukup terkendali Rp401,77 triliun atau 1,81 persen terhadap PDB.

Realisasi Pembiayaan Anggaran mencapai Rp428,81 triliun atau 82,02 persen dari pagu terdiri atas Pembiayaan Utang Rp483,60 triliun atau 74,62 persen dari pagu dan Pembiayaan Investasi negatif Rp56,26 triliun atau 31,92 persen dari pagu. Secara lebih rinci, Pembiayaan Utang berasal dari Surat Berharga Negara (Neto) Rp437,17 triliun dan Pinjaman (Neto) Rp46,44 triliun. Pinjaman (Neto) berasal dari Pinjaman Dalam Negeri (Neto) Rp6,64 triliun dan Pinjaman Luar Negeri (Neto) Rp39,80 triliun.

Pembiayaan Investasi terutama ditujukan untuk mendukung BUMN dan BLU. Investasi kepada BUMN terealisasi negatif Rp28,16 triliun untuk mendorong capaian infrastruktur strategis dan meningkatkan daya saing BUMN. Selain itu Pemerintah juga merealisasikan Investasi kepada BLU negatif Rp22,50 triliun. Sebagai komitmen kerja sama internasional, investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional terealisasi negatif Rp1,98 triliun. Pemerintah mengeluarkan pembiayaan investasi nonpermanen negatif Rp17,02 triliun dan menerima pengembalian investasi Rp13,41 triliun. Pemerintah memberikan Pinjaman Rp0,78 triliun dan Pembiayaan Lainnya Rp0,68 triliun.

Halaman Ini Dikosongkan

Perkembangan Ekonomi Nasional Tetap Terjaga di Pertengahan Kuartal IV 2024



Perkembangan Ekonomi Makro

Perkembangan ekonomi nasional tetap terjaga di pertengahan kuartal IV 2024. Aktivitas ekonomi masyarakat dari sisi konsumsi terus bergerak positif di tengah tekanan ekonomi global. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap kuat berada pada level 125,9 di November 2024 yang mengindikasikan penguatan optimisme masyarakat terhadap perkembangan ekonomi ke depan. Kondisi penguatan sisi konsumsi juga diperlihatkan dengan tren peningkatan indeks penjualan riil. Aktivitas sektor manufaktur mulai meningkat dari bulan sebelumnya meskipun angka *purchasing managers' indeks* (PMI) manufaktur masih di bawah level 50. Di sisi lain, pembangunan nasional di 2024 mampu meningkatkan kualitas



Aktivitas ekonomi masyarakat dari sisi konsumsi terus bergerak positif di tengah tekanan ekonomi global. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap kuat berada pada level 125,9 di November 2024

pembangunan manusia Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2024 mencapai level 75,02, di atas target sasaran pembangunan IPM 2024 yang ditargetkan 73,99 – 74,02.

Tekanan terhadap stabilitas pasar keuangan nasional terkendali. IHSG tercatat pada level 7.157 pada penutupan perdagangan 17 Desember 2024. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dengan menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia tercatat Rp16.017 per USD pada 17 Desember 2024 dan rata-rata nilai tukar Rupiah adalah Rp15.835 per USD. Rupiah tercatat terdepresiasi 3,76 persen terhadap posisi awal tahun. Inflasi November 2024 terkendali 1,55 persen (yoy), lebih rendah dari Oktober 2024, 1,71 persen (yoy) didorong oleh perlambatan inflasi pangan yang terus berlanjut dan tren penguatan inflasi inti. Secara bulan ke bulan, inflasi mencapai 0,30 persen (mtm). Pemerintah akan tetap mengendalikan harga pangan pokok, terutama dalam menyiapkan ketersediaan pasokan menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia di tingkat pusat dan daerah melalui TPIP dan TPID untuk menciptakan bauran kebijakan yang tepat guna menjaga pergerakan inflasi di dalam target sasaran. Posisi cadangan devisa nasional Indonesia per akhir November 2024 tercatat USD150,2 miliar, sedikit menurun dibandingkan oktober 2024 yang tercatat USD151,2 miliar. Posisi cadangan devisa mampu mendukung stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan dari goncangan eksternal.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia di Oktober 2024 tetap tinggi, mencapai 1,19 juta kunjungan. Wisman yang berkunjung pada Oktober 2024 didominasi oleh wisman yang berasal dari Malaysia (16,26 persen), Australia (12,61 persen), dan Singapura (8,90

persen). Secara kumulatif, kunjungan wisman pada Januari hingga Oktober 2024 tercatat 11,57 juta kunjungan atau meningkat 20,45 persen (yoy). Perkembangan aktivitas pariwisata nasional akan terus meningkat dan secara langsung akan berdampak positif terhadap perkembangan sektor ekonomi terkait lainnya. Sektor yang terkait dengan aktivitas pariwisata secara langsung adalah sektor makanan dan akomodasi, hotel, transportasi, serta perdagangan. Sementara itu, kondisi Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Oktober 2024 mencapai 55,67 persen, naik 2,65 poin (yoy).

Halaman Ini Dikosongkan

APBN Terus Dioptimalkan Peranannya Sebagai Shock Absorber

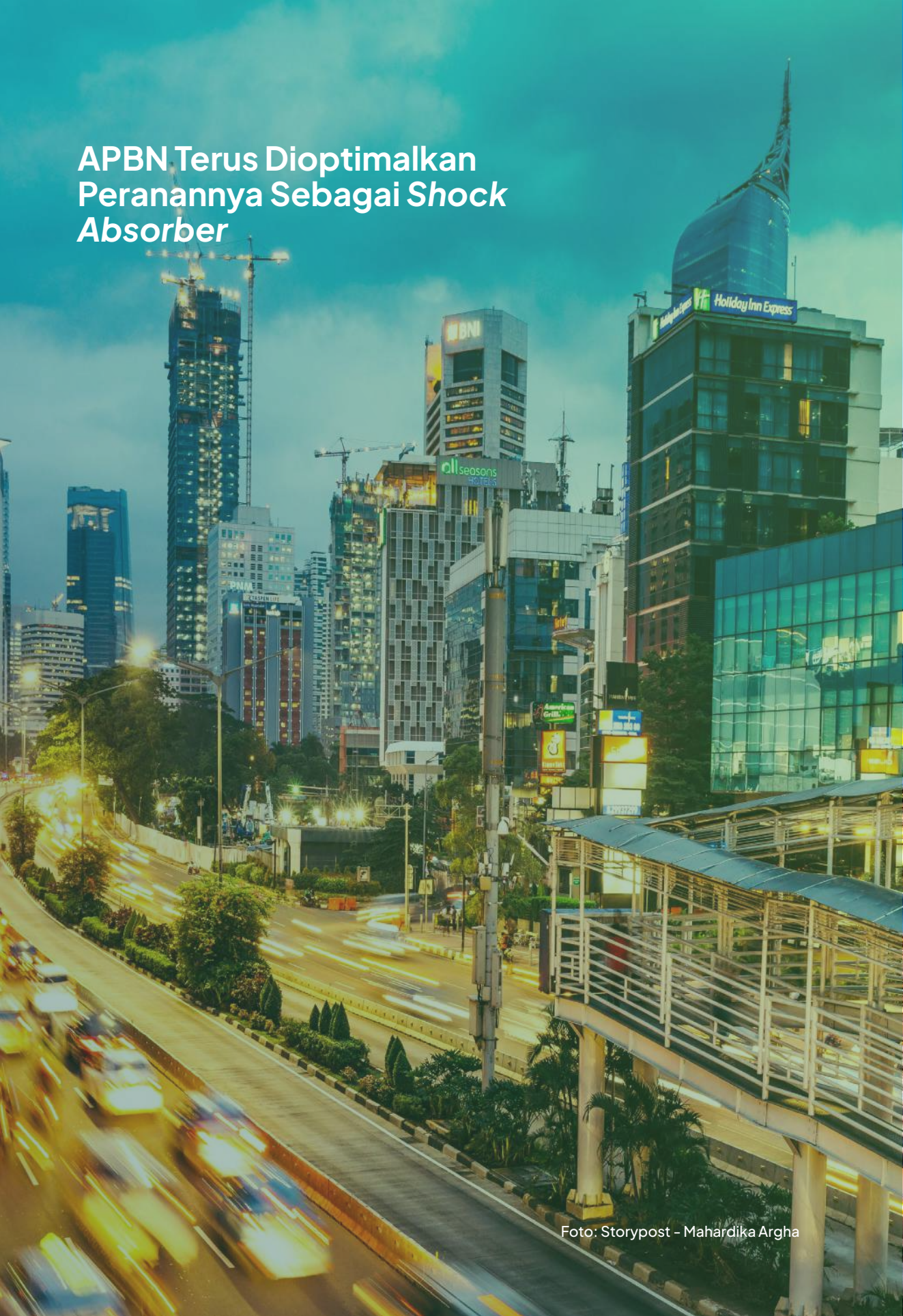


Foto: Storypost - Mahardika Argha

Postur APBN

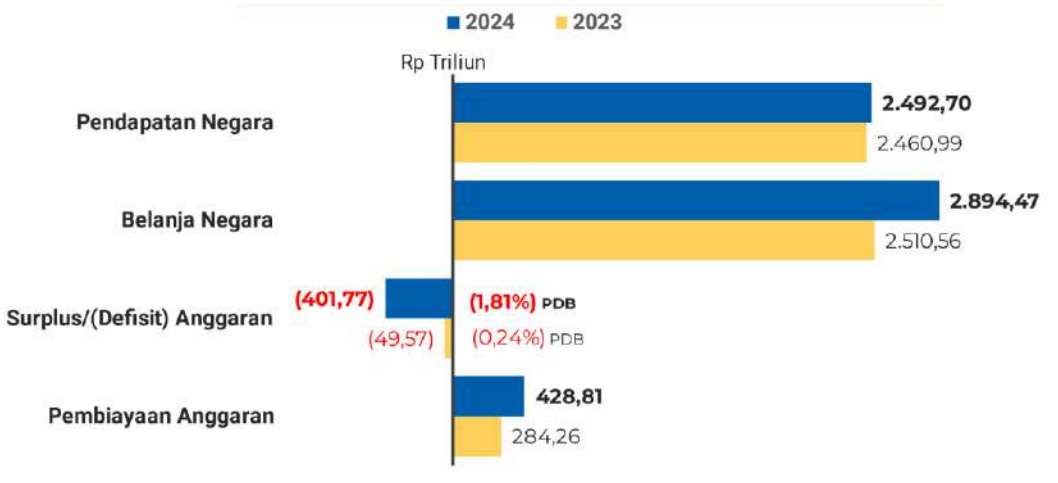
Realisasi APBN sampai dengan 30 November 2024 mencatatkan Pendapatan Negara yang mencapai Rp2.492,70 triliun, 88,95 persen dari target atau tumbuh 1,29 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri atas:

Penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.946,68 triliun, 84,28 persen dari target, atau tumbuh 1,66 persen (yoy). Capaian tersebut terdiri atas Penerimaan Pajak Rp1.688,93 triliun, 84,92 persen dari target atau tumbuh 1,14 persen (yoy) serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp257,75 triliun, 80,30 persen dari target atau tumbuh 5,20 persen (yoy).

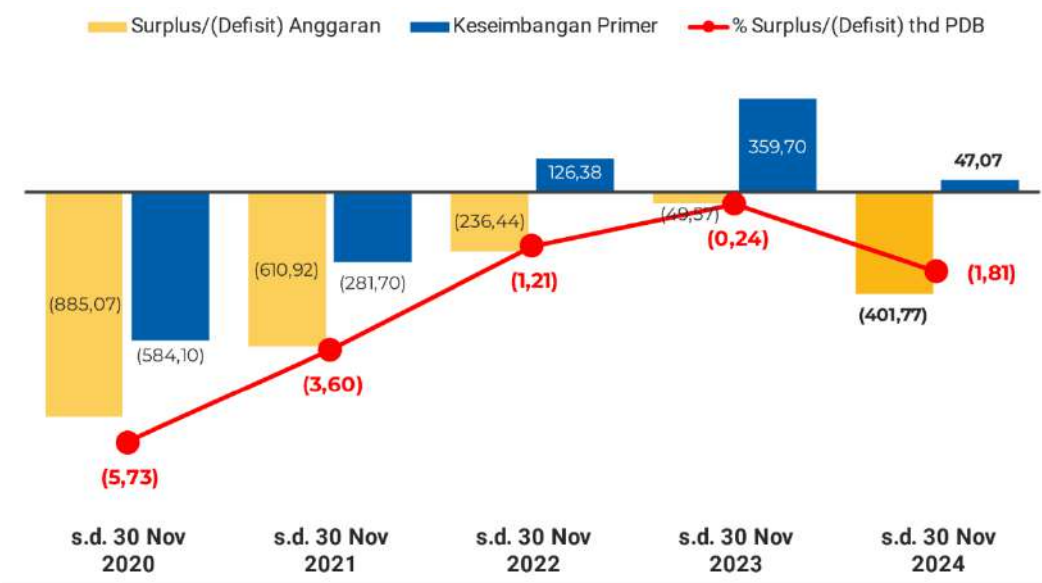


Realisasi APBN sampai dengan 30 November 2024 mencatatkan peningkatan pendapatan negara sebesar 1,29 persen (yoy).

Realisasi APBN
s.d. 30 November 2024



Perkembangan Surplus/Defisit
dan Keseimbangan Primer



Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp522,41 triliun, 106,18 persen dari target atau terkontraksi 4,01 persen (yoy).

Penerimaan Hibah mencapai Rp23,61 triliun, meningkat signifikan dibandingkan realisasi pada periode yang sama 2023 dengan capaian Rp1,82 triliun.

Di sisi Belanja Negara, sampai dengan 30 November 2024 telah terealisasi Rp2.894,47 triliun, 87,05 persen dari pagu atau meningkat 15,29 persen (yoy), terdiri atas:

Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.098,65 triliun, 85,05 persen dari pagu atau meningkat 18,27 persen (yoy). Capaian tersebut terdiri atas realisasi Belanja K/L Rp1.049,72 triliun, 96,23 persen dari pagu atau meningkat 17,92 persen (yoy) dan realisasi Belanja non-K/L Rp1.048,93 triliun, 76,19 persen dari pagu atau meningkat 18,62 persen (yoy).

Transfer ke Daerah mencapai Rp795,82 triliun, 92,80 persen dari alokasi atau meningkat 8,11 persen (yoy).

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara tersebut, APBN tercatat defisit Rp401,77 triliun atau 1,81 persen terhadap PDB (per 30 November 2023, defisit tercatat Rp49,57 triliun atau 0,24 persen terhadap PDB). Sementara itu, keseimbangan primer tercatat surplus Rp47,07 triliun (per 30 November 2023, surplus keseimbangan primer mencapai Rp359,70 triliun). Di sisi pembiayaan anggaran, telah terealisasi Rp428,81 triliun (82,02 persen dari target), lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama 2023 dengan capaian Rp284,26 triliun.

Realisasi APBN s.d. 30 November 2023 –2024

APBN (triliun rupiah)	2023				2024			
	Perpres 75/2023	Realisasi s.d. 30 November	% thd Perpres 75/2023	Growth (%, yoy)	APBN	Realisasi s.d. 30 November	% thd APBN	Growth (%, yoy)
A. Pendapatan Negara	2.637,25	2.460,99	93,32	3,51	2.802,29	2.492,70	88,95	1,29
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.634,15	2.459,16	93,36	3,49	2.801,86	2.469,09	88,12	0,40
1. Penerimaan Perpajakan	2.118,35	1.914,92	90,40	3,56	2.309,86	1.946,68	84,28	1,66
a. Pajak	1.818,24	1.669,92	91,84	6,44	1.988,88	1.688,93	84,92	1,14
b. Kepabeanan dan Cukai	300,11	245,00	81,64	(12,57)	320,98	257,75	80,30	5,20
2. PNBP	515,80	544,24	105,51	3,22	492,00	522,41	106,18	(4,01)
II. Penerimaan Hibah	3,10	1,82	58,87	54,65	0,43	23,61	5.483,77	1.193,97
B. Belanja Negara	3.117,18	2.510,56	80,54	(3,96)	3.325,12	2.894,47	87,05	15,29
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.302,46	1.774,46	77,07	(5,73)	2.467,53	2.098,65	85,05	18,27
1. Belanja K/L	1.000,84	890,18	88,94	1,41	1.090,83	1.049,72	96,23	17,92
2. Belanja Non K/L	1.301,61	884,28	67,94	(11,96)	1.376,70	1.048,93	76,19	18,62
II. Transfer Ke Daerah	814,72	736,10	90,35	0,60	857,59	795,82	92,80	8,11
C. Keseimbangan Primer	(38,53)	359,70	(933,61)	184,61	(25,51)	47,07	(184,56)	(86,91)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(479,93)	(49,57)			(522,83)	(401,77)		
% Surplus/(Defisit) thd PDB	(2,27)	(0,24)			(2,29)	(1,81)		
E. Pembiayaan Anggaran	479,93	284,26	59,23	(35,74)	522,83	428,81	82,02	50,85

Perbaikan Kinerja Sektor Utama Mendorong Penerimaan Pajak Tumbuh Positif Pada Periode November 2024



Foto: Unsplash - Chintya Akemi

Penerimaan Pajak

Perbaikan kinerja yang mulai terlihat sejak Mei 2024 akhirnya memberikan hasil yang menggembirakan.

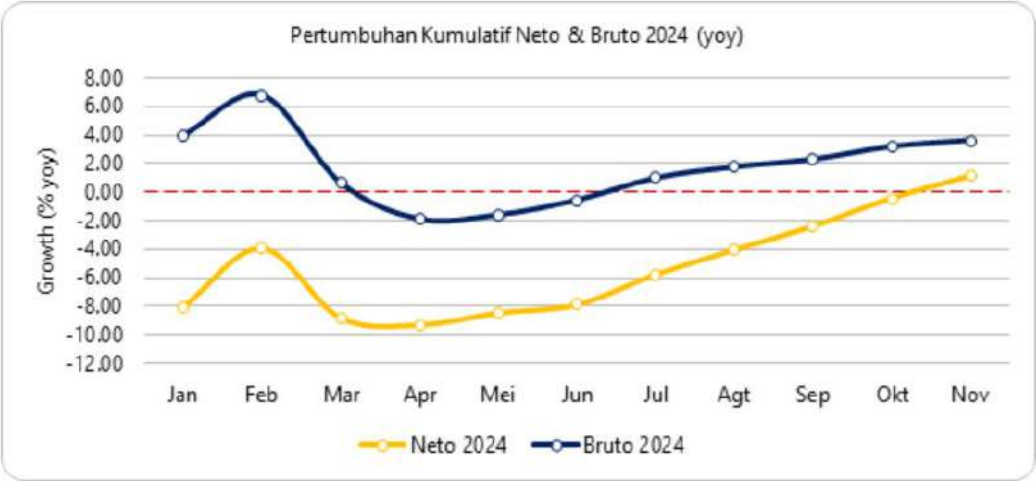
Pada akhir November 2024, pertumbuhan penerimaan pajak tercatat positif, baik secara bruto maupun neto. Pertumbuhan neto kumulatif tercatat 1,14 persen (yoy), membaik dibandingkan periode Oktober 2024 yang berkontraksi 0,42 persen (yoy). Sementara itu, pertumbuhan bruto telah menunjukkan tren positif sejak Juli dan terus meningkat hingga akhir November 2024.

Secara nominal, total realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.688,93 triliun atau 84,92 persen dari target. Pemulihan kinerja penerimaan pajak terutama didukung oleh perbaikan atas setoran PPh Nonmigas dan PPN.



Pertumbuhan neto kumulatif tercatat 1,14 persen (yoy), membaik dibandingkan periode Oktober 2024 yang berkontraksi 0,42 persen (yoy).

Perkembangan Pertumbuhan
Penerimaan Pajak 2024



Realisasi Penerimaan Pajak 2024

Uraian	Target APBN 2024 (Triliun)	1 Januari s.d. 30 November 2024				
		Realisasi Neto (Triliun)	Kontribusi (%)	Capaian (%)	Growth Neto (% yoy)	Growth Bruto (% yoy)
Pajak Penghasilan	1139,78	944,66	55,93	82,88	-2,36	-0,11
- Nonmigas	1063,41	885,77	52,45	83,30	-1,96	0,43
- Migas	76,37	58,89	3,49	77,10	-8,03	-8,03
PPN & PPnBM	811,36	707,76	41,91	87,23	6,11	8,17
PBB dan Pajak Lainnya	37,73	36,52	2,16	96,79	3,23	2,65
Jumlah	1988,88	1688,93	100,00	84,92	1,14	3,64



Pemulihan kinerja kumulatif PPN dan PPnBM didorong oleh aktivitas ekonomi domestik dan impor yang membaik, terutama di sektor perdagangan dan industri minyak kelapa sawit.

Realisasi PPh Nonmigas mencapai Rp885,77 triliun, atau 83,30 persen dari target. Realisasi ini terkontraksi 1,96 persen (yoy), tetapi lebih baik dari kontraksi periode Oktober yang tercatat 3,12 persen (yoy). Meskipun secara neto masih terkontraksi, penerimaan bruto PPh Nonmigas telah tumbuh positif. Hal ini didukung oleh pemulihan kinerja sektor pertambangan dalam beberapa bulan terakhir, yang berkontribusi pada peningkatan penerimaan atas angsuran PPh Badan. Selain itu, kinerja penerimaan pajak penghasilan nonmigas lainnya turut menopang pertumbuhan. Beberapa di antaranya bahkan tercatat tumbuh dua digit, termasuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh OP, dan PPh Final.

Selanjutnya, PPN dan PPnBM kembali menunjukkan pertumbuhan positif, baik dari sisi penerimaan neto maupun bruto. Realisasi kelompok pajak ini mencapai Rp707,76 triliun, 87,23 persen dari target, atau tumbuh 6,11 persen (yoy). Pemulihan kinerja

kumulatif PPN dan PPnBM didorong oleh aktivitas ekonomi domestik dan impor yang membaik, terutama di sektor perdagangan dan industri minyak kelapa sawit. Kondisi ini tercermin pada peningkatan PPN DN dan PPN Impor.

PBB dan Pajak Lainnya juga tumbuh positif pada periode ini, yakni mencapai Rp36,52 triliun, 96,79 persen dari target, atau tumbuh 3,23 persen (yoy). Perbaikan kinerja kelompok pajak ini dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran PBB Pertambangan.

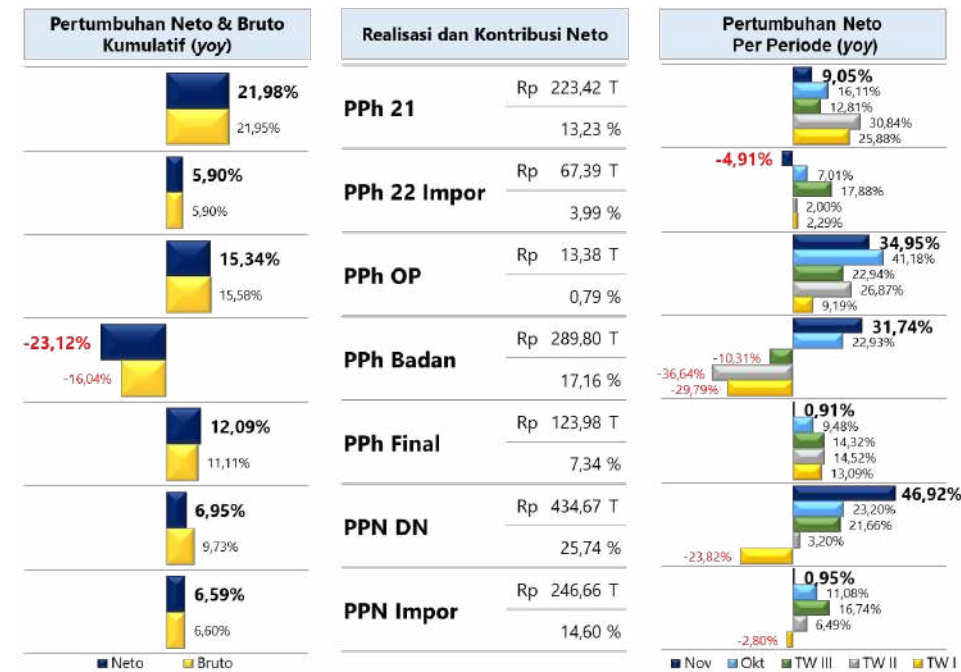
Di sisi lain, kinerja PPh Migas masih terkontraksi, tetapi dengan laju yang lebih lambat dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya. Secara nominal, realisasi PPh Migas mencapai Rp58,89 triliun, 77,10 persen dari target, atau terkontraksi 8,03 persen (yoy). Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan *lifting* minyak dan gas bumi.

Kinerja Jenis Pajak Utama

Beberapa jenis pajak utama tercatat tumbuh positif baik dari sisi penerimaan kumulatif maupun bulanan. Pertumbuhan positif yang konsisten, terutama dari PPh Pasal 21, PPh Final, PPh OP, dan PPN Impor, turut mendorong kinerja penerimaan pajak. Ditambah lagi kinerja PPN DN yang kembali menguat pada November 2024. Selain itu, PPh Badan menunjukkan pemulihan signifikan (*turnaround*) dalam tiga bulan terakhir.

Secara lebih rinci, hingga 30 November 2024, PPN Dalam Negeri yang berkontribusi 25,74 persen terhadap total penerimaan pajak mencatatkan pertumbuhan 6,95 persen (yoy). Kinerja positif ini didorong oleh konsumsi domestik yang masih terjaga sehingga terjadi peningkatan pembayaran PPN Dalam Negeri pada berbagai sektor usaha, terutama sektor Perdagangan.

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama



Selanjutnya, PPh Badan terealisasi Rp289,80 triliun, terkontraksi 23,12 persen (yoy). Meskipun demikian, kontraksi pada PPh Badan terus menunjukkan penurunan yang lebih moderat sejak periode Mei 2024. Bahkan dalam tiga bulan terakhir, realisasi bulanan PPh Badan mampu tumbuh positif secara *year-on-year*. Perbaikan kinerja ini didorong oleh dinamisasi pembayaran angsuran PPh Badan dan peningkatan hasil intensifikasi sebelum tahun pajak berjalan. Peningkatan pembayaran angsuran terutama berasal dari sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan.

PPh Pasal 21 menyumbang 13,23 persen terhadap total penerimaan pajak, dengan pertumbuhan yang tercatat 21,98 persen (yoy). Kinerja positif PPh Pasal 21 yang konsisten di atas 20 persen ditopang oleh kompensasi gaji atau upah karyawan/tenaga kerja yang masih terjaga dengan baik.

Berikutnya, realisasi PPh Final berkontribusi 7,34 persen terhadap total penerimaan pajak, dengan pertumbuhan yang tercatat 12,09 persen (yoy). Kondisi perekonomian nasional yang baik mendukung capaian PPh Final, yang terlihat dari peningkatan realisasi pada beberapa objek pajak. Objek pajak tersebut mencakup penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, persewaan atau pengalihan tanah dan/atau bangunan, serta jasa konstruksi.

PPh OP juga menunjukkan kinerja yang positif, dengan realisasi Rp13,38 triliun atau tumbuh 15,34 persen (yoy). Kinerja ini didorong oleh kenaikan setoran atas pajak penghasilan tahunan dan angsuran yang dibayar oleh wajib pajak individu.

Kinerja penerimaan pajak utama terkait dengan impor juga tumbuh positif secara kumulatif. Penerimaan PPN Impor tumbuh 6,59 persen (yoy), sementara PPh Pasal 22 Impor tumbuh



**Secara lebih rinci,
hingga 30 November
2024, PPN Dalam Negeri
yang berkontribusi
25,74 persen terhadap
total penerimaan
pajak mencatatkan
pertumbuhan 6,95
persen (yoy).**

5,90 persen (yoy). Kedua jenis pajak ini memberikan kontribusi yang signifikan, 18,59 persen terhadap total penerimaan pajak. Peningkatan impor dari sub sektor perdagangan besar mesin, bahan kimia, dan bahan bakar menjadi penopang capaian pajak impor.

Kinerja Sektor Utama

Pertumbuhan kumulatif dari seluruh sektor utama lebih baik dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya. Kinerja bulanan bahkan lebih menggembirakan, dengan pertumbuhan positif yang tercatat mencapai dua digit. Sektor Industri Pengolahan dan Pertambangan mengalami *turnaround*, yang semakin memperkuat tren positif pertumbuhan di seluruh sektor utama.

Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan memang masih terkontraksi secara kumulatif, namun angkanya semakin kecil. Kedua

sektor ini mengalami pemulihan yang signifikan sejak triwulan ketiga.

Perbaikan kinerja penerimaan sektor Industri Pengolahan secara keseluruhan didorong oleh peningkatan pembayaran atas PPN Impor dan PPN Dalam Negeri, disertai dengan pertumbuhan restitusi yang melambat. Bila dilihat lebih jauh, kinerja subsektor industri sepeda motor, kendaraan dan industri rokok menjadi penopang perbaikan sektoral. Secara kumulatif sektor Industri Pengolahan berkontraksi 4,27 persen (yoy), namun tumbuh 17,79 persen (yoy) secara bulanan.

Sektor Pertambangan mengalami perbaikan yang didorong oleh kinerja positif dari subsektor pertambangan bijih logam. Hal ini terlihat dari peningkatan angsuran PPh Badan, seiring dengan proyeksi laba subsektor tersebut yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, upaya intensifikasi pajak dari tahun pajak sebelumnya juga berkontribusi terhadap pemulihan. Secara kumulatif Sektor Pertambangan berkontraksi 37,27 persen (yoy), namun tumbuh 49,63 persen (yoy) secara bulanan.

Pada periode ini, sektor yang mampu tumbuh dua digit secara kumulatif yaitu Sektor Keuangan dan Asuransi serta Sektor Konstruksi dan Real Estat. Pertumbuhan kedua sektor tersebut masing-masing tercatat 12,95 persen (yoy) dan 10,55 persen (yoy). Sektor Keuangan & Asuransi tumbuh konsisten *dua digit* didukung oleh peningkatan dana pihak ketiga, kredit, dan rata-rata suku bunga. Sementara itu, sektor Konstruksi dan Real Estat didorong oleh performa positif pada subsektor konstruksi gedung dan subsektor real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.

Selanjutnya, Sektor Perdagangan, Sektor Transportasi dan Pergudangan, serta Sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh kuat baik kumulatif dan

bulanan. Pertumbuhan kumulatif masing-masing tercatat 7,53 persen (yoy), 7,01 persen (yoy), dan 9,14 persen (yoy). Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya.

Halaman Ini Dikosongkan



Surplus Neraca Perdagangan Nasional November 2024 Mencapai USD4,42 Miliar

Foto: Kemenkeu – Ardo Hadyan

Penerimaan Kepabeanan & Cukai

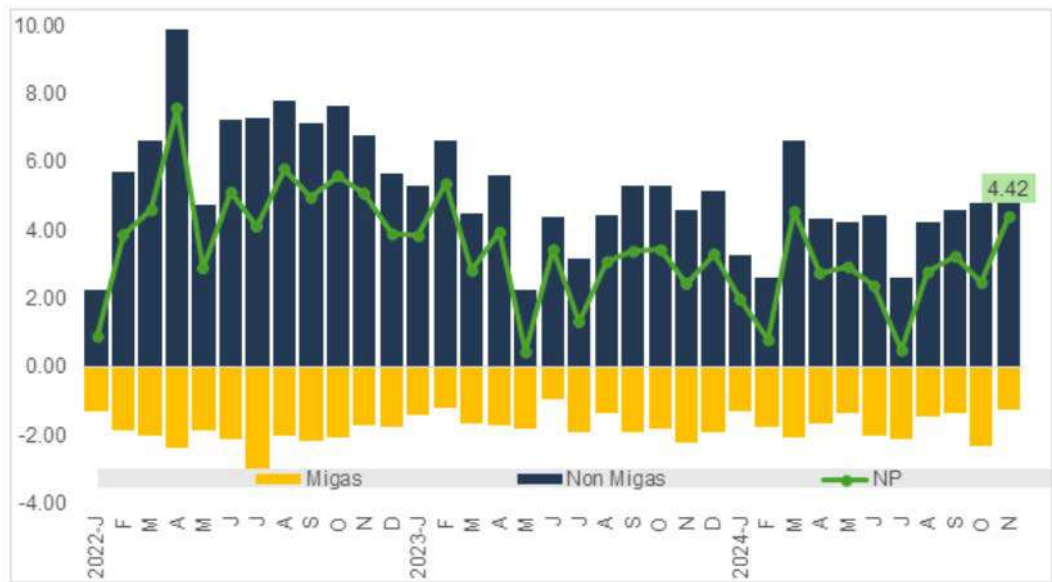
Surplus neraca perdagangan Indonesia pada November 2024 berhasil mencapai USD4,42 miliar, menunjukkan kinerja positif dan keberlanjutan dalam mempertahankan surplus sejak Mei 2020, yaitu selama 55 bulan berturut-turut. Hasil ini berperan penting dalam menjaga cadangan devisa negara dan memperkuat persepsi positif global terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, surplus yang konsisten ini menambah ketahanan ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan dari fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian ekonomi di pasar internasional.

Secara akumulatif, surplus perdagangan sampai dengan November 2024 mencapai USD28,86 miliar. Hal ini mencerminkan stabilitas



Selain itu, surplus yang konsisten ini menambah ketahanan ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan dari fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian ekonomi di pasar internasional.

Grafik Neraca Perdagangan
Indonesia 2022–2024



Realisasi Penerimaan Kepabeanaan
dan Cukai (dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2023	2024	2023	2024	
1	BEA MASUK	57,37	45,87	47,72	0,19%	4,02%	83,17%
2	CUKAI	246,08	187,43	192,73	-4,25%	2,83%	78,32%
	Hasil Tembakau	230,41	179,99	184,34	-4,49%	2,42%	80,01%
	Ethil Alkohol	0,10	0,11	0,13	-1,13%	12,57%	124,01%
	MMEA	9,33	7,21	8,13	1,25%	12,65%	87,08%
	Denda Adm. Cukai	-	0,10	0,12	128,73%	25,81%	-
	Cukai Lainnya	-	0,02	0,02	-19,75%	11,12%	-
	Plastik	1,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	MBDK	4,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3	BEA KELUAR	17,53	11,70	17,30	-69,77%	47,87%	98,67%
	TOTAL	320,98	245,00	257,75	-12,57%	5,20%	80,30%
	PPN Impor		231,40	246,66	-5,19%	6,59%	
	PPNBM Impor		6,12	5,83	37,77%	-4,65%	
	PPH Pasal 22 Impor		63,63	67,39	-6,31%	5,90%	
	Total PDRI lainnya		301,15	319,88	-4,83%	6,22%	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		546,15	577,63	-8,46%	5,76%	

Sumber: DJPB 5 Desember 2024

serta efektivitas kebijakan ekspor yang diterapkan, bersama dengan pengendalian impor yang ketat. Surplus berkelanjutan ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi domestik tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan. Keberhasilan ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perekonomian berkelanjutan, memperkuat daya saing ekspor, serta memastikan perkembangan ekonomi yang stabil di masa depan.

Surplus neraca perdagangan terutama terjadi pada Nonmigas, sedangkan Migas masih defisit. Kinerja positif neraca Nonmigas didukung oleh komoditas SDA seperti batubara dan minyak goreng kelapa sawit. Selain itu, sektor manufaktur terutama logam dasar seperti besi, baja dan bijih tembaga juga memberikan kontribusi penting dalam menciptakan surplus tersebut. Di sisi lain, neraca perdagangan sektor Migas masih defisit, terutama disebabkan oleh impor bahan bakar dan minyak bumi.

Pada November 2024, total ekspor mencapai USD24,01 miliar, naik 9,14 persen (yoy), didorong oleh kinerja sektor Nonmigas maupun Migas. Ekspor Nonmigas tumbuh 9,54 persen (yoy) dengan kontribusi peningkatan terbesar dari ekspor produk baja dasar dan kakao sebagai dampak kenaikan harga. Ekspor sektor Migas tumbuh 2,73 persen (yoy), dipengaruhi kenaikan ekspor minyak bakar ke Singapura dan Malaysia.

Sementara itu, impor mencapai USD19,59 miliar atau tumbuh 0,01 persen (yoy), dipengaruhi oleh peningkatan kinerja sektor Nonmigas sedangkan sektor Migas menurun. Nonmigas tumbuh 5,71 persen (yoy) terutama dari peningkatan impor logam, komponen elektronik dan bagian komputer serta kendaraan, dan mesin industri. Kinerja tersebut mengindikasikan geliat pertumbuhan industri. Namun demikian impor Migas berkontraksi 26,32 persen (yoy) terutama oleh penurunan impor

bensin, minyak bumi, dan solar.

Hingga 30 November 2024, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp257,75 triliun, 80,30 persen dari target atau tumbuh 5,20 persen (yoy), didorong oleh semua jenis penerimaan yang menunjukkan kinerja positif pada bulan ini.

Sementara itu, Penerimaan PDRI lainnya mencapai Rp319,88 triliun atau naik 6,22 persen (yoy). Dengan demikian, Penerimaan Negara yang telah dikumpulkan dari Kepabeanan dan Cukai serta PDRI lainnya mencapai Rp577,63 triliun atau naik 5,76 persen (yoy).

Dari sisi BM, kinerja penerimaan meningkat 4,02 persen (yoy) menjadi Rp47,72 triliun atau mencapai 83,17 persen dari target. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan impor dan depresiasi rupiah terhadap USD. Dilihat dari komoditasnya, kenaikan tersebut terutama berasal dari gas, bahan baku plastik sebagai dampak dari peningkatan industri, serta importasi beras yang meningkat sebagai langkah menjaga kestabilan harga pangan.

Penerimaan BK tercatat Rp17,30 triliun, mencapai 98,67 persen dari target atau tumbuh signifikan 47,87 persen (yoy). Peningkatan tersebut terutama berasal dari BK mineral dan produk kelapa sawit. BK mineral tumbuh signifikan mencapai 90,74 persen (yoy), dipengaruhi oleh relaksasi ekspor tembaga. Sedangkan penerimaan BK produk sawit mulai meningkat 8,42 persen (yoy), dipengaruhi oleh kenaikan harga CPO pada Oktober dan November 2024.

Cukai, mesin utama Penerimaan Kepabeanan dan Cukai dengan penerimaan terbesar, mencapai Rp192,73 triliun atau 78,32 persen dari target, atau tumbuh 2,83 persen (yoy). Kinerja tersebut didorong oleh kinerja cukai dari Cukai Hasil Tembaku (CHT), Minuman Mengandung Ethil



**Cukai, mesin
utama Penerimaan
Kepabeanaan dan Cukai
dengan penerimaan
terbesar, mencapai
Rp192,73 triliun atau
78,32 persen dari
target, atau tumbuh
2,83 persen (yoy).**

Alkohol (MMEA), dan Ethil Alkohol (EA).

Penerimaan CHT tumbuh 2,42 persen (yoy) menjadi Rp184,34 triliun atau tercapai 80,01 persen dari target. Kinerja ini dipengaruhi peningkatan produksi 0,1 persen (yoy), terutama pada jenis Sigaret Keretek Tangan (SKT) sedangkan Sigaret Keretek Mesin (SKM) menurun. SKT merupakan produk yang melibatkan banyak tenaga kerja manual, yang peningkatannya dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan SKM.

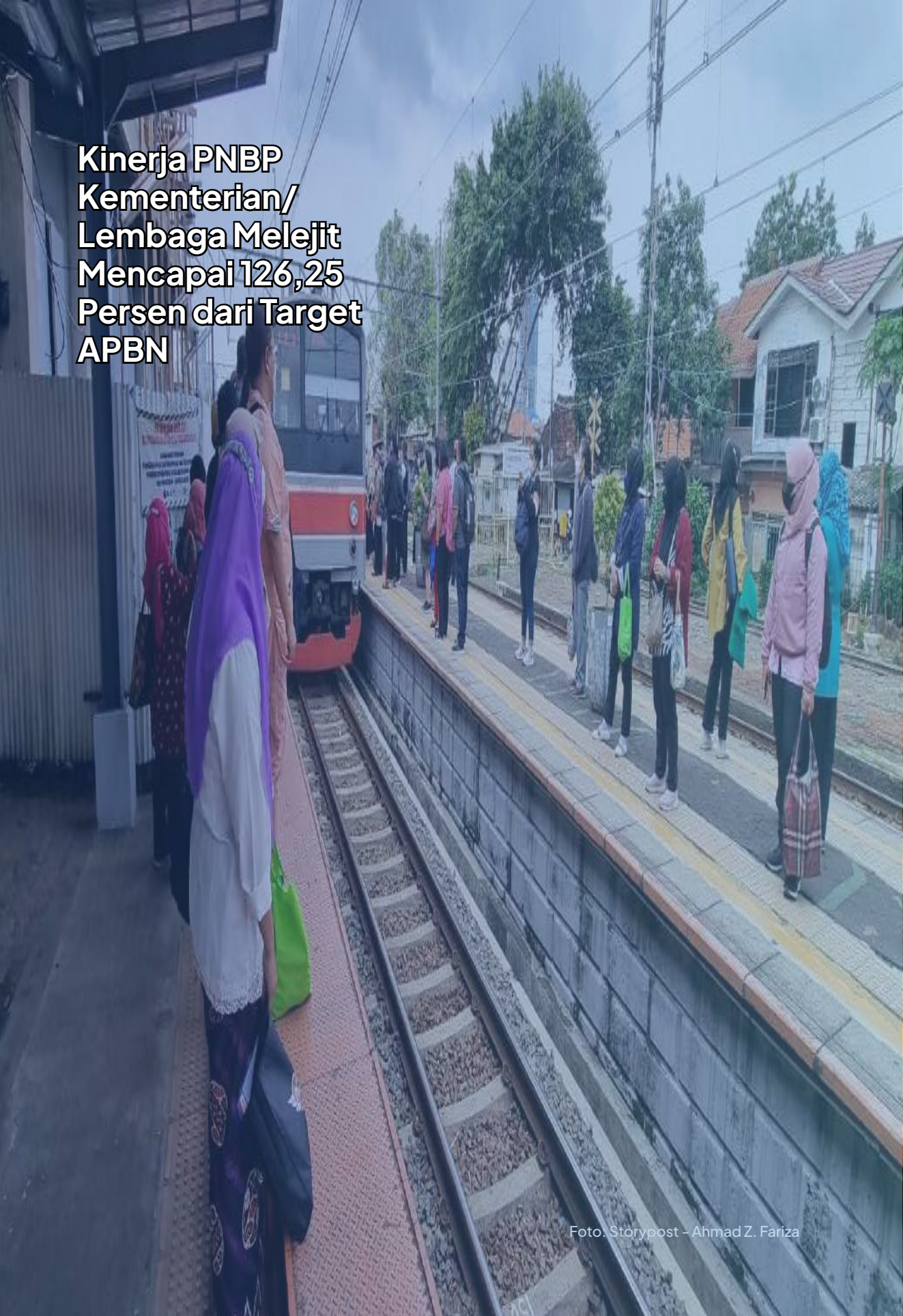
Penerimaan Cukai MMEA naik 12,65 persen (yoy) menjadi Rp8,13 triliun, mencapai 87,08 persen dari target. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh kebijakan kenaikan tarif MMEA sedangkan produksi masih terkendali, turun 2,70 persen (yoy). Hal tersebut sejalan dengan kebijakan peningkatan tarif sebagai upaya untuk mengendalikan konsumsi minuman beralkohol. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi

dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan negara dari sektor cukai.

Sementara itu, kinerja Penerimaan Cukai EA naik 12,57 persen (yoy) menjadi Rp129,32 miliar, atau 124,01 persen dari target. Kinerja positif tersebut didorong oleh peningkatan produksi EA bayar 12,57 persen (yoy). Nilai penerimaan EA tidak signifikan karena sebagian besar EA yang diproduksi, cukai tidak dipungut atau dibebaskan, baik untuk keperluan medis, industri maupun fasilitas lainnya.

Halaman Ini Dikosongkan

**Kinerja PNBP
Kementerian/
Lembaga Melejit
Mencapai 126,25
Persen dari Target
APBN**



Penerimaan Negara Bukan Pajak

Situasi ekonomi global yang masih sangat dinamis dampak tensi geopolitik dan keamanan global yang tinggi mewarnai pergerakan harga dan nilai tukar. Harga komoditas batubara masih termoderasi sejak awal 2024 dan berlanjut hingga akhir November 2024. Pelemahan kinerja ekspor dan perdagangan turut menekan pendapatan negara.

Realisasi PNBPN hingga November 2024 tercatat 106,18 persen dari target. Pendapatan dari layanan PNBPN K/L dan pendapatan BLU mampu memberikan kontribusi signifikan mendorong capaian PNBPN. Meski terjadi penurunan lifting minyak dan gas bumi serta pelemahan tajam Harga Batubara Acuan (HBA).

Pendapatan SDA mencapai Rp211,78 triliun, 101,98 persen dari



Pendapatan dari layanan PNBPN K/L dan pendapatan BLU mampu memberikan kontribusi signifikan mendorong capaian PNBPN.

Realisasi PNBP sampai
dengan 30 November 2024

PNBP (Triliun Rupiah)	APBN 2024	s.d. 30 November 2023			s.d. 30 November 2024		
		Real s.d. 30 Nov	% thd APBN	Growth (%)	Real s.d. 30 Nov	% thd APBN	Growth (%)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	492,00	544,24	105,51%	3,22%	522,41	106,18%	-4,01%
A Pendapatan SDA	207,67	235,89	105,63%	-1,10%	211,78	101,98%	-10,22%
Migas	110,15	108,96	105,17%	-19,93%	104,09	94,50%	-4,47%
a Minyak Bumi	80,54	89,44	117,14%	-17,72%	79,06	98,16%	-11,61%
b Gas Bumi	29,62	19,52	71,64%	-28,70%	25,04	84,53%	0,00%
Nonmigas	97,52	126,93	106,03%	23,90%	107,69	110,43%	-15,16%
a Pendapatan Pertambangan Minerba	85,84	119,48	108,64%	25,93%	98,84	115,14%	-17,28%
b Pendapatan Kehutanan	6,00	4,88	85,91%	-1,36%	5,96	99,25%	22,00%
c Pendapatan Kelautan & Perikanan	3,50	0,49	30,10%	-51,70%	0,80	22,72%	62,24%
d Pendapatan Panas Bumi	2,18	2,08	85,63%	29,38%	2,10	96,65%	1,18%
B Pendapatan KND	85,85	81,54	100,01%	100,86%	86,38	100,62%	5,93%
a Laba BUMN Perbankan	46,66	40,84	100,00%	66,17%	49,59	106,28%	21,43%
b. Laba BUMN Nonperbankan	39,18	40,70	102,12%	154,11%	36,79	93,89%	-9,62%
C Pendapatan PNBP Lainnya	115,14	146,72	111,58%	-15,26%	135,46	117,66%	-7,67%
a. Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	27,70	39,00	108,03%	-40,81%	30,42	109,81%	-22,01%
b. Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	6,83	2,67	38,12%	-73,51%	3,29	48,11%	23,23%

target. Realisasi Pendapatan SDA Migas melemah dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Pelemahan ini terutama disebabkan oleh penurunan lifting minyak bumi dan gas bumi, serta pelemahan HBA. Lifting minyak bumi berkontraksi 4,14 persen (yoy) dan lifting gas bumi mengalami berkontraksi 1,01 persen (yoy) disebabkan tingkat penurunan alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua (khususnya Wilayah Kerja pada Cepu dan Banyu Urip). Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas mencapai Rp107,69 triliun, 110,43 persen dari target, berkontraksi 15,16 persen (yoy). Penurunan kinerja tersebut terutama dipengaruhi oleh kinerja penerimaan royalti batubara yang menurun dampak HBA yang termoderasi. Royalti batubara berkontraksi 23,45 persen (yoy), meski volume produksi batubara mengalami kenaikan 4,98 persen (yoy).

Pendapatan sektor Minerba mencapai Rp98,84 triliun, 115,14 persen dari target. Realisasi ini berkurang

dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Faktor penurunan harga batubara dan mineral di pasar internasional menyumbang pengurangan Pendapatan sektor Minerba. Rata-rata HBA bulan Januari sampai dengan November 2024 berkontraksi 41,85 persen (yoy).

Pendapatan sektor Kehutanan mencapai Rp5,96 triliun, 99,25 persen dari target, meningkat 22,00 persen (yoy) antara lain disebabkan oleh pembayaran Dana Reboisasi (DR) & Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang bersumber dari pendapatan perkebunan Kelapa Sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan (Keterlanjuran Sawit) sebagai amanat pasal 110A UUCK serta peningkatan pembayaran piutang Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).

Sementara itu, realisasi Pendapatan sektor Kelautan dan Perikanan khususnya dari Perikanan mencapai Rp795,16 miliar, 22,72 persen dari target atau tumbuh 62,24 persen (yoy)



Di sisi lain, PNBP beberapa K/L tumbuh signifikan seperti Kementerian Perhubungan serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

sebagai dampak peningkatan volume produksi kapal perikanan dengan izin pusat. Realisasi Pendapatan Perikanan menurun signifikan pada 2023. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan mekanisme perhitungan PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dari praproduksi menjadi pascaproduksi (sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 85/2021) belum memberikan dampak positif. Pada periode Januari sampai dengan November 2023 realisasi PNBP PHP Pascaproduksi hanya menghasilkan Rp451,35 miliar karena masih banyak kapal perikanan yang masih memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Praproduksi yang masih aktif sehingga belum memiliki kewajiban pembayaran PNBP PHP pascaproduksi. Sementara itu, pada 2024 seluruh kapal perikanan telah memiliki SIPI pascaproduksi sehingga pembayaran PNBP PHP menggunakan mekanisme pascaproduksi melesat menjadi Rp767,63 miliar (meningkat hampir 2 kali lipat).

Selanjutnya, capaian Pendapatan sektor Panas Bumi tercatat Rp2,10 triliun, 96,65 persen dari target atau

tumbuh 1,18 persen (yoy). Hal ini disebabkan kewajiban pemerintah yang berkurang menjadi faktor pengurang Setoran Bagian Pemerintah (SBP).

Realisasi Pendapatan KND mencapai Rp86,38 triliun, 100,62 persen dari target. Perekonomian nasional yang pulih pada 2023 mendatangkan profit signifikan bagi BUMN, khususnya BUMN Perbankan. Kontributor utama capaian Pendapatan KND berasal dari pembayaran dividen Bank Himbara untuk tahun buku 2023. Pada 2024 setoran dividen perbankan mencapai Rp49,59 triliun atau tumbuh 21,43 persen dibandingkan 2023 yang tercatat Rp 40,84 triliun. Capaian tersebut menjadikan sektor perbankan sebagai kontributor utama setoran dividen BUMN kepada pemerintah.

Capaian realisasi PNBP Lainnya mencapai Rp135,46 triliun, 117,66 persen dari target atau melambat 7,67 persen (yoy). Pendapatan minyak mentah (DMO) tumbuh 23,23 persen (yoy). Namun pertumbuhan tersebut belum mampu menopang kontraksi pendapatan penjualan hasil tambang (PHT) dan pendapatan PNBP K/L yang masing-masing terkontraksi 22,01 persen (yoy) dan 3,13 persen (yoy).

Pendapatan PNBP K/L mencapai Rp101,76 triliun, 126,25 persen dari target atau melambat 3,13 persen (yoy). Kontraksi ini disebabkan oleh pendapatan nonlayanan yang tidak berulang di 2024 pada Kejaksaan, Kominfo, dan Kemenkes. Di sisi lain, PNBP beberapa K/L tumbuh signifikan seperti Kementerian Perhubungan serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kinerja PNBP pada Kementerian Perhubungan tumbuh 22,91 persen (yoy) dampak kenaikan pendapatan jasa transportasi dari pendapatan kepelabuhan dan Track Access Charge (TAC). Sementara itu, kinerja PNBP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tumbuh 14,45 persen (yoy) dampak kenaikan pendapatan pelayanan administrasi

dan hukum (visa, paspor, dll) karena peningkatan volume kunjungan wisata ke Indonesia yang didukung penggunaan aplikasi layanan visa elektronik melalui MOLINA Imigrasi).

Realisasi Pendapatan PHT mencapai Rp30,42 triliun, 109,81 persen dari target atau melambat 22,01 persen (yoy) disebabkan oleh moderasi HBA. Rata-rata HBA (utama) bulan Januari sampai dengan November 2024 mencapai USD121,39/ton lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama 2023 yang mencapai USD208,76/ton.

Realisasi Pendapatan BLU mencapai Rp88,78 triliun, 106,51 persen dari target atau tumbuh 10,84 persen (yoy). Capaian tersebut didominasi dari pendapatan Non Kelapa Sawit yang tumbuh 26,32 persen (yoy) terutama dari pendapatan jasa pelayanan RS, layanan Pendidikan (terutama dipengaruhi adanya satker BLU baru sepanjang tahun 2024), dan pendapatan pengelolaan dana BLU serta jasa layanan perbankan BLU. Sementara itu, Pendapatan BLU Sawit mencapai Rp22,20 triliun atau melambat 18,94 persen (yoy) karena rata-rata harga referensi CPO Kementerian Perdagangan periode Januari sampai dengan November 2024 berkontraksi 0,10 persen (yoy) menjadi USD836.0/MT.

Halaman Ini Dikosongkan

**Realisasi BPP
Dimanfaatkan
Terutama
untuk Menjaga
Kesejahteraan
Masyarakat dan
Mendorong
Pertumbuhan
Ekonomi yang Inklusif
serta Pembayaran
Kewajiban
Pemerintah**



Foto: Unsplash - Yulia Agnis

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi BPP tersebut terutama dimanfaatkan untuk menjaga/meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pembangunan infrastruktur, sarana prasarana pertanian, keterjangkauan energi, dan dukungan kepada UMKM. Selain itu, realisasi BPP juga dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024, pembangunan IKN, dan pembayaran kewajiban Pemerintah.

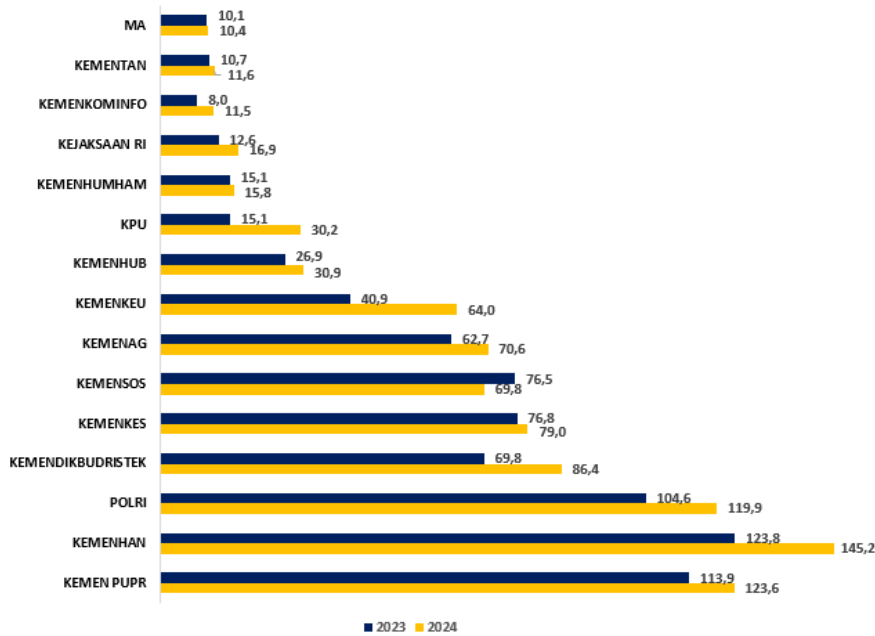
Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L sampai dengan 30 November 2024 mencapai Rp1.049,72 triliun atau 96,23 persen dari pagu atau tumbuh 17,92 persen (yoy). Belanja K/L dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran berbagai program bantuan sosial, dukungan penyelenggaraan Pemilu, dukungan penyelenggaraan Pilkada Serentak, penyaluran beasiswa, pembangunan infrastruktur, pemeliharaan BMN, pengadaan sarana dan prasarana bidang hankam, serta pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri termasuk THR dan Gaji ke-13.

Realisasi s.d November Belanja Pemerintah Pusat 2024 (dalam triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat	APBN	Realisasi sd November	% thd APBN	Growth (%)
Belanja K/L	1.090,83	1.049,72	96,23	17,92
Belanja Pegawai	285,80	265,29	92,82	12,93
Belanja Barang	405,26	399,34	98,54	23,18
Belanja Modal	247,47	245,23	99,09	29,63
Bantuan Sosial	152,30	139,87	91,84	(1,42)
Belanja Non-K/L	1.376,70	1.048,93	76,19	18,62
a.l Belanja Pegawai	198,63	171,12	86,15	15,48
Subsidi	285,97	244,14	85,37	20,70
Belanja Lain-Lain	388,04	183,44	47,27	48,83
Total	2.467,53	2.098,65	85,05	18,27

Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Terbesar s.d 30 November TA 2023–2024 (triliun Rupiah)



Belanja Pegawai terealisasi Rp265,29 triliun, 92,82 persen dari pagu atau tumbuh 12,93 persen (yoy). Realisasi Belanja Pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri termasuk pembayaran THR dan Gaji ke-13 ASN/TNI/Polri.

Belanja Barang K/L terealisasi Rp399,34 triliun, 98,54 persen dari pagu atau tumbuh 23,18 persen (yoy). Peningkatan realisasi tersebut antara lain karena kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2024, dan pembayaran bantuan pangan (bantuan beras, daging ayam, dan telur). Selain itu, secara rinci realisasi Belanja Barang dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pengelolaan BMN Matra Darat/Laut/Udara/Integratif, pengadaan/harwat/peningkatan alutsista dan non alutsista, dan pelayanan kesehatan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan); (2) pembayaran selisih harga biodiesel serta penyaluran beasiswa LPDP oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu); (3) preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, permukiman dan bangunan gedung, pemeliharaan sarpras SDA serta penanggulangan darurat akibat bencana, air minum yang layak, serta akses rumah layak huni oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR); (4) pembayaran honorarium pengawas Badan Ad hoc, pemungutan dan penghitungan suara, pengadaan barang/jasa/logistik Pemilu 2024, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU); (5) Penyaluran BOS kepada 9,4 juta siswa oleh Kementerian Agama; serta (6) Pembayaran bantuan pangan (beras, daging ayam, dan telur) kepada 23,4 juta KPM oleh Bapanas.

Realisasi Belanja Modal mencapai Rp245,23 triliun, 99,09 persen dari pagu atau tumbuh 29,62 persen (yoy) yang dipengaruhi antara lain oleh peningkatan belanja infrastruktur KemenPUPR, dan pengadaan alutsista Kemenhan. Kinerja



Realisasi BPP dimanfaatkan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pembayaran kewajiban Pemerintah.

realisasi Belanja Modal dimanfaatkan antara lain untuk: (1) preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan dasar/menengah/tinggi, pengembangan jaringan irigasi, pengembangan bendungan dan danau, pengendalian banjir/drainase/pengaman pantai, penyelenggaraan sanitasi, rusun ASN dan Hankam IKN, bangunan Gedung IKN, serta penyelenggaraan air minum (SPAM) oleh KemenPUPR; (2) infrastruktur perkeretaapian, transportasi udara, dan transportasi laut oleh Kemenhub; (3) sarana dan prasarana pendidikan tinggi oleh Kemendikbudristek; (4) sarana dan prasarana madrasah, serta pendidikan tinggi oleh Kemenag; (5) modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarana prasarana pertahanan oleh Kementerian Pertahanan; (6) modernisasi almatsus, dan sarana prasarana Polri; serta (7) pengadaan peralatan BIN.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) mencapai Rp139,87 triliun, 91,84 persen dari pagu atau terkonsentrasi 1,42 persen (yoy) yang antara lain dipengaruhi oleh bansos PKH dan Kartu Sembako yang belum tersalurkan melalui PT Pos. Realisasi Belanja Bansos antara lain dimanfaatkan untuk: (1) penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); (2) penyaluran bantuan program kartu sembako bagi 18,7 juta KPM; (3) penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (4) penyaluran bantuan PIP bagi 21,1 juta siswa dan bantuan KIPK bagi 1,1 juta mahasiswa; serta (5) pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh BNPB.

Dari perspektif organisasi, realisasi Belanja K/L terutama disumbangkan oleh 15 K/L dengan pagu terbesar yang mewakili 84,4 persen dari total realisasi belanja K/L. Realisasi tersebut terutama didorong oleh realisasi pada: (1) Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan, bendungan; (2) Kemenhan untuk perawatan/pengadaan alutsista; (3) Polri untuk pengadaan alamsus; (4) Kemendikbudristek untuk penyaluran PIP dan KIP Kuliah; (5) Kemenkes untuk penyaluran bantuan iuran PBI/JKN dan pengadaan alat-alat kesehatan; dan (6) Kemensos untuk penyaluran PKH dan Kartu Sembako.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L sampai dengan 30 November 2024 mencapai Rp1.048,93 triliun, 76,19 persen dari pagu atau tumbuh 18,62 persen (yoy). Realisasi Belanja Non-K/L tersebut terutama dipengaruhi oleh penyaluran subsidi dan kompensasi energi serta pembayaran manfaat pensiun.

Belanja Pegawai Non-K/L terealisasi Rp171,12 triliun, 86,15 persen dari pagu atau tumbuh 15,48 persen (yoy), antara lain digunakan untuk

pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/Polri, termasuk pembayaran THR dan Gaji ke-13 pensiunan ASN/TNI/Polri.

Realisasi Belanja Subsidi mencapai Rp244,14 triliun, 85,37 persen dari pagu atau naik 20,70 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh kenaikan realisasi Subsidi Energi dan Subsidi Nonenergi. Realisasi tersebut terdiri atas: (a) Subsidi Energi Rp157,16 triliun, mencakup Subsidi BBM Rp19,90 triliun, Subsidi LPG Tabung 3 kg Rp73,08 triliun, dan Subsidi Listrik Rp64,18 triliun; dan (b) Subsidi Nonenergi Rp86,98 triliun, mencakup Subsidi Pupuk Rp35,99 triliun, Subsidi PSO Rp4,97 triliun, Subsidi Bunga Kredit Program Rp38,16 triliun, dan Subsidi Pajak Rp7,86 triliun. Realisasi pembayaran Subsidi Energi tersebut untuk penyaluran BBM bersubsidi 15,11 juta KL, LPG Tabung 3 kg 6,86 juta MT, pelanggan listrik bersubsidi sejumlah 41,46 juta pelanggan, dan volume konsumsi listrik bersubsidi 59,34 TWh. Realisasi Subsidi Nonenergi terutama dimanfaatkan untuk Subsidi Bunga KUR kepada 4,71 juta debitur, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) perumahan untuk 165,72 ribu unit rumah bersubsidi, serta penyaluran pupuk bersubsidi 6,71 juta ton.

Realisasi Belanja Lain-Lain mencapai Rp183,44 triliun, 47,27 persen dari pagu atau meningkat 48,83 persen (yoy). Realisasi tersebut terutama digunakan untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik yang mencapai Rp176,39 triliun. Selain itu, Belanja Lain-Lain juga dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Program Kartu Prakerja dengan realisasi Rp4,18 triliun bagi 1,42 juta peserta.

Halaman Ini Dikosongkan

**Sampai dengan Akhir
November 2024,
TKD Telah Disalurkan
Rp795,82 Triliun,
92,80 persen dari
Pagu atau Naik 8,11
Persen (yoy)**

Transfer ke Daerah

Sampai dengan akhir November 2024, TKD telah disalurkan Rp795,82 triliun atau 92,80 persen dari pagu, lebih tinggi Rp59,72 triliun, atau naik 8,11 persen (yoy).

DANA BAGI HASIL

Sampai dengan 30 November 2024, penyaluran DBH mencapai Rp128,44 triliun atau 89,75 persen dari pagu, meningkat 8,68 persen (yoy). Capaian tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pagu DBH SDA Minerba 2024 yang tercatat 24,6 persen (yoy).



Kenaikan realisasi DAU tersebut berasal dari peningkatan realisasi penyaluran DAU *Block Grant* dan juga penyaluran DAU *Specific Grant* yang telah selesai tahap ke III.

Realisasi TKD T.A. 2023 & 2024
Per Tanggal: 30 November 2024

dalam miliar Rupiah

Uraian	TA 2023			TA 2024			
	APBN	Realisasi	% thd APBN	APBN	Realisasi	% thd APBN	% YoY Nom (2023-24)
Transfer ke Daerah	814.718,49	736.100,3	90,35	857.591,74	795.820,8	92,80	8,11
Dana Bagi Hasil	136.259,97	118.177,1	86,73	143.099,93	128.435,3	89,75	8,68
Dana Alokasi Umum	396.000,00	370.763,3	93,63	427.699,30	417.825,5	97,69	12,69
Dana Alokasi Khusus	185.797,26	157.367,9	84,70	188.101,01	158.859,5	84,45	0,95
1. DAK Fisik	53.422,46	39.347,2	73,65	53.822,46	39.537,6	73,46	0,48
2. DAK Nonfisik	130.297,27	116.297,2	89,26	133.764,61	118.720,1	88,75	2,08
3. Hibah ke Daerah	2.077,52	1.723,6	82,96	513,94	601,8	117,10	-65,08
Dana Otonomi Khusus	17.241,26	17.241,3	100,00	18.271,49	14.065,9	76,98	-18,42
Dana Keistimewaan DIY	1.420,00	1.372,7	96,67	1.420,00	1.420,0	100,00	3,45
Dana Desa	70.000,00	65.180,5	93,12	71.000,00	69.168,7	97,42	6,12
Insentif Fiskal	8.000,00	5.997,6	74,97	8.000,00	6.045,9	75,57	0,81

DANA ALOKASI UMUM

Realisasi penyaluran DAU pada akhir November 2024 mencapai Rp417,83 triliun atau 97,69 persen dari pagu, meningkat 12,69 persen (yoy). Kenaikan realisasi DAU tersebut berasal dari peningkatan realisasi penyaluran DAU *Block Grant* dan juga penyaluran DAU *Specific Grant* yang telah selesai tahap ke III, realisasi DAU tersebut akan meningkat di Desember 2024 seiring dengan realisasi DAU *Block Grant* Desember, dan DAU *Specific Grant* khususnya untuk dukungan penggajian PPPK yang masih akan salur pada bulan Desember 2024.

DANA TRANSFER KHUSUS

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) pada akhir November 2024, telah terealisasi 39,54 triliun atau 73,46 persen dari pagu.

Jumlah ini naik 0,48 persen (yoy) karena perbaikan nilai kontrak dan lebih banyak OPD yang menyampaikan syarat

salur dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Strategi percepatan penyaluran DAK Fisik untuk penyaluran s.d. batas waktu 16 Desember 2024 pukul 17.00 WIB dengan mendorong pemda untuk: (i) meningkatkan pemahaman regulasi pengelolaan DAK Fisik terutama terkait pembaharuan tata kelola penyaluran DAK Fisik sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/2024 tentang Pengelolaan DAK Fisik; (ii) meningkatkan kualitas dan integritas SDM pengelola keuangan daerah termasuk APIP Daerah; dan (iii) penguatan koordinasi antarlevel pemerintahan dan internal pemerintah daerah agar pemanfaatan DAK Fisik lebih optimal.

Sementara itu, DAK Nonfisik telah disalurkan Rp118,72 triliun, meningkat 2,08 persen (yoy) atau 88,75 persen dari pagu. Capaian tersebut terutama di Januari telah dilakukan penyaluran Tahap I Dana BOSP yang terdiri atas Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan. Selain itu, terdapat perbaikan tata kelola penyampaian data

BOS di daerah dan di Kemendikdasmen. Untuk penyaluran sampai November telah dilakukan sesuai ketentuan.

Sedangkan realisasi untuk penyaluran Hibah kepada Daerah pada akhir November 2024 mencapai 601,8 miliar atau 117,10 persen dari pagu, turun 65,08 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Rp 1,72 triliun) mengingat: (a) penyaluran atas pekerjaan konstruksi pada Hibah MRT baru dilaksanakan sesuai kemajuan pekerjaan; (b) Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan Hibah Sanitasi baru disalurkan pada Bulan Desember sesuai periode permintaan penyaluran; dan (c) terdapat penambahan pagu Hibah Daerah yang bersumber dari pengalihan dana Cadangan (Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) maupun Pinjaman LN. Namun demikian, pagu Hibah Daerah TA 2024 tetap menurun sebesar 34,96 persen dibandingkan TA 2023, sehingga secara umum berpengaruh terhadap perhitungan nilai realisasi TA 2024.

Capaian realisasi penyaluran Hibah kepada Daerah dipengaruhi oleh penyaluran 6 (enam) jenis hibah kepada daerah yaitu Hibah *Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling up Initiative* (READ-SI), Hibah *Mass Rapid Transit (MRT) Project*, Hibah *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND), Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia, Hibah Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang dan Hibah *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (Bio CF ISFL).

DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Sampai dengan akhir November 2024, realisasi Dana Otonomi Khusus telah mencapai Rp14,07 triliun, 76,98 persen dari pagu atau turun 18,42 persen (yoy). Penurunan tersebut



Sampai dengan akhir November 2024, realisasi Dana Otonomi Khusus telah mencapai Rp14,07 triliun, 76,98 persen dari pagu atau turun 18,42 persen (yoy).

disebabkan karena kepatuhan pemda dalam penyampaian dokumen syarat salur tahap II dan Tahap III lebih lambat, terutama dari pemda di wilayah papua.

Dalam rangka mempercepat pemenuhan dokumen syarat salur tahap II dan tahap III telah dilakukan pendampingan, bimbingan teknis dan asistensi kepada Pemda terkait pemenuhan dokumen syarat salur Dana Otonomi Khusus.

Penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap I tahun 2024 (30 persen pagu alokasi masing-masing daerah penerima) dilakukan setelah pemda menyampaikan dokumen syarat salur berupa: 1) laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus 2023 dan 2) hasil validasi atas integrasi RAP dengan APBD 2024, diterima secara lengkap dan benar paling lambat pada akhir April 2024.

Penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap II 2024 (45 persen pagu alokasi) dilakukan setelah pemda menyampaikan dokumen syarat salur

berupa : 1) laporan kinerja realisasi anggaran tahap I paling rendah 50,0 persen dari total dana yang telah disalurkan; 2) laporan kinerja capaian keluaran tahap I paling rendah 15,0 persen dari total rencana keluaran; dan 3) laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya, diterima secara lengkap dan benar paling lambat akhir Juni 2024

Penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap III 2024 (25 persen pagu alokasi) dilakukan setelah pemda menyampaikan dokumen syarat salur berupa : 1) laporan kinerja realisasi anggaran sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling rendah 75,0 persen dari total dana yang telah disalurkan; 2) laporan kinerja capaian keluaran sampai dengan tahap II paling rendah 50,0 persen dari total rencana keluaran; dan 3) laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya, diterima secara lengkap dan benar paling lambat akhir November 2024.

Dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI secara lengkap dan benar sampai dengan bulan November, penyaluran sisa pagu alokasi otsus Papua dan otsus Aceh yang belum disalurkan dilakukan paling lama tujuh hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan.

Sementara itu, sampai dengan akhir November 2024, Dana Keistimewaan TA 2024 Tahap II telah disalurkan Rp1,42 triliun (100 persen dari pagu) atau tetap dengan nilai salur Tahap II tahun lalu. Sesuai amanat PMK Nomor 163/2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY, penyaluran Dana Keistimewaan telah disalurkan Tahap I Rp213 miliar, sehingga total salur Tahap I dan Tahap II dari RKUN ke RKUD Rp 1,136 triliun (80 persen dari pagu)

atau meningkat 4,34 persen (yoy).

DANA DESA

Sampai dengan periode ini, Dana Desa telah disalurkan Rp69,17 triliun atau 97,42 persen dari pagu, meningkat 6,112 persen (yoy). Capaian tersebut dipengaruhi oleh redesign penyaluran Dana Desa melalui pemisahan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk: (1) program penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa; (2) program ketahanan pangan dan hewani; serta (3) program pencegahan dan penurunan stunting, dan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya. Selain itu, diberikan juga reward berupa persentase penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I (satu) lebih besar untuk Desa berstatus Mandiri dibandingkan dengan Desa non-Mandiri.

Kenaikan jumlah Desa berstatus Mandiri juga berkontribusi dalam meningkatkan capaian kinerja penyaluran karena persentase penyaluran Desa Mandiri lebih tinggi dibandingkan dengan Desa non-Mandiri. Selanjutnya, kinerja capaian penyaluran tersebut juga disebabkan karena adanya penyederhanaan kebijakan penyaluran bagi Desa non-Mandiri, dari sebelumnya 3 (tiga) tahap menjadi 2 (dua) tahap. Selain itu, terjadi peningkatan kepatuhan dalam penyampaian syarat salur oleh desa melalui pemerintah daerah sehingga capaian kinerja penyaluran Dana Desa mengalami perbaikan.

INSENTIF FISKAL

Realisasi penyaluran Insentif Fiskal (IF) sampai dengan 30 November 2024 telah mencapai Rp6,05 triliun, 75,57 persen dari pagu alokasi, atau naik 0,81 persen (yoy). Perbaikan capaian tersebut salah satunya disebabkan oleh upaya koordinasi yang terus dijalin untuk

meningkatkan pemahaman daerah terkait pemenuhan syarat salur IF yang jatuh tempo pada akhir November 2024.

Selama 2024, alokasi IF telah ditetapkan Rp7,4 triliun yang terdiri atas IF Kinerja Tahun Sebelumnya (Rp4 triliun), IF Kinerja Inflasi (Rp300 miliar), dan IF Kelompok Kategori Kinerja Kesejahteraan Masyarakat (Rp3,1 triliun). Penyaluran alokasi IF ke daerah dilakukan dalam 2 tahap, masing-masing 50 persen setelah syarat salur terpenuhi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 125/2023 maupun PMK Nomor 43/2024.

A full-page photograph of an oil rig. In the foreground, two workers in blue uniforms and white hard hats are seen from behind, standing on a yellow metal platform. In the background, another worker is visible on a higher level of the rig, also in blue and with a harness. The rig's structure is complex, with yellow and grey metal components, pipes, and cables. A large, dark, rectangular object is suspended by a cable on the left side. The sky is a clear, pale blue.

Pembiayaan
Utang On-track
dan Manageable
Mendukung
Konsolidasi
untuk Menjaga
Kesinambungan
Fiskal

Foto: Storypost – Muhammad Safei

Pengelolaan Utang

Defisit APBN 2024 ditargetkan 2,29 persen dari PDB, dengan realisasi hingga akhir November 2024 terkendali dalam batas aman (*prudent*) yang tercatat 1,81 persen dari PDB. Berdasarkan laporan pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2024, *outlook* defisit anggaran 2024 akan berada pada level 2,70 persen terhadap PDB (*Outlook*). Penetapan defisit APBN tak lepas dari keputusan pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.

Pembiayaan APBN 2024 dikelola secara prudent dan terukur serta mempertimbangkan *outlook* defisit APBN, kondisi likuiditas pemerintah, dan perkembangan pasar keuangan

sehingga kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan. Pembiayaan utang menjadi salah satu instrumen untuk menutupi defisit, dan dijalankan secara hati-hati, fleksibel, oportunistik dan akuntabel. Target pembiayaan dipenuhi secara *on-track*, dengan *cost of fund* yang efisien dan risiko yang terkendali.

Realisasi pembiayaan utang sampai dengan akhir November 2024 mencapai Rp483,60 triliun atau 74,6 persen dari target (87,4 persen dari *Outlook*), terdiri atas realisasi SBN (Neto) Rp437,17 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) Rp46,44 triliun.

Penerbitan SBN di pasar domestik menjadi prioritas dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN untuk mengendalikan risiko. Guna mencapai efisiensi biaya utang, Pemerintah

Pembiayaan Utang

***Data per 30 November 2024**

ff Pembiayaan utang *on-track* dan *manageable* mendukung konsolidasi untuk menjaga kesinambungan fiskal

Realisasi Pembiayaan Utang *dalam triliun Rupiah	s.d 30 November 2024 
	Rp 483,60
Surat Berharga Negara (Neto)	Rp 437,17
Pinjaman (Neto)	Rp 46,44

Pengadaan utang melalui SBN sepanjang bulan November 2024 dilakukan melalui 4x lelang reguler dengan mencatatkan bid to cover ratio sebesar 1,57 kali. Pemerintah Indonesia kembali menerbitkan Sukuk Global senilai USD2,75 miliar dalam format Reg S/144A, terdiri dari tenor 5,5 tahun (USD1,1 miliar), 10 tahun (USD900 juta), dan 30 tahun (USD750 juta) 

Kinerja Lelang SBN s.d November 2024	Sukuk Global November 2024
 Rata-rata penawaran yang masuk tiap lelang Rp 37,02 triliun  Rata-rata nominal dimenangkan tiap lelang Rp 16,25 triliun	USD 2,75 miliar  USD 750 juta tenor 30 tahun USD 900 juta tenor 10 tahun USD 1.100 juta tenor 5,5 tahun

ff Penerbitan SBN di pasar domestik menjadi prioritas dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN untuk mengendalikan risiko

berupaya mendorong terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid di antaranya melalui lelang SBN domestik secara reguler dengan mekanisme pasar, yaitu investor menyampaikan penawaran (*bid*) kompetitif melalui Dealer Utama. Selama November 2024, telah dilaksanakan 4 kali lelang SBN dengan mencatatkan *bid to cover ratio* sebesar 1,57x. Sepanjang tahun 2024 sampai dengan bulan November, rata-rata penawaran yang masuk pada lelang SBN mencapai Rp37,02 triliun/lelang dengan rata-rata nominal yang dimenangkan sebesar Rp16,25 triliun/lelang.

Selanjutnya, sebagai bagian dari pengelolaan portofolio pembiayaan, pemerintah juga telah melakukan lelang pembelian kembali secara langsung pada 21 November 2024 dengan menggunakan fasilitas dealing room DJPPR dengan jumlah nominal yang dibeli kembali pemerintah Rp1 triliun.

Pada 18 November 2024, Pemerintah Indonesia kembali menerbitkan *Sukuk Global* senilai USD2,75 miliar dalam format Reg S/144A, terdiri dari tenor 5,5 tahun (USD1,1 miliar), 10 tahun (USD900 juta), dan 30 tahun (USD750 juta). Penerbitan ini merupakan yang keempat di pasar surat utang global dalam mata uang USD selama 2024, menunjukkan minat investor dan kepercayaan pasar yang masih tinggi terhadap pemerintah RI dengan mencatat kelebihan permintaan (*oversubscribed*) lebih dari 1,8x permintaan. Penerbitan *Sukuk Global* ini menggunakan struktur akad Wakalah dan telah memperoleh persetujuan opini syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) serta beberapa lembaga internasional yang berwenang sebagai komite pengawas Syariah.

Sementara itu, ditinjau dari posisi *outstanding* utang pemerintah, jumlah utang pemerintah per akhir November 2024 mencapai Rp8.680,13 triliun.



Penerbitan ini merupakan yang keempat di pasar surat utang global dalam mata uang USD selama 2024, menunjukkan minat investor dan kepercayaan pasar yang masih tinggi terhadap pemerintah RI dengan mencatat kelebihan permintaan (*oversubscribed*) lebih dari 1,8x permintaan.

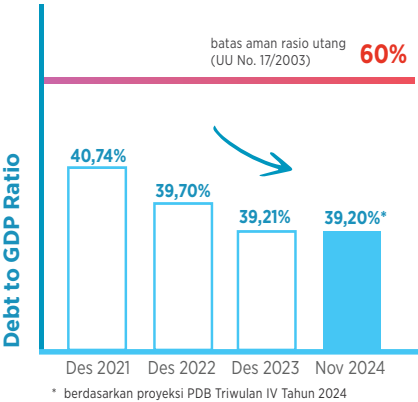
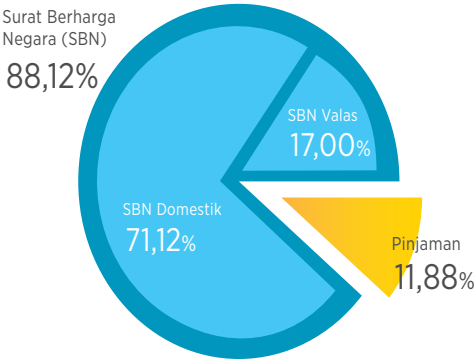
Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal. Rasio utang per akhir November 2024 yang tercatat 39,20 persen terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir November 2024,

Komposisi Utang

***Data per 30 November 2024**

Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik

Posisi Utang



Surat Berharga Negara		
Rp 7.648,87		
*dalam triliun Rupiah		
• Domestik	Rp 6.173,37	
Surat Utang Negara	Rp 4.979,64	
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 1.193,73	
• Valas	Rp 1.475,50	
Surat Utang Negara	Rp 1.082,67	
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 392,83	

Pinjaman		
Rp 1.031,26		
*dalam triliun Rupiah		
• Pinjaman DN*	Rp 42,88	
• Pinjaman LN*	Rp 988,38	
Bilateral	Rp 265,74	
Multilateral	Rp 576,34	
Comercial Banks	Rp 146,30	
Suppliers	Rp -	

profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (*average time maturity/ATM*) di 8,01 tahun.

Risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar juga terkendali, di mana 80,3 persen total utang menggunakan suku bunga tetap (*fixed rate*) dan 71,6 persen total utang dalam Rupiah. Hal ini selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 88,12 persen.

Pasar SBN yang efisien akan meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan. Dengan aktivitas pembiayaan utang melalui penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. SBN turut menyediakan referensi untuk menentukan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan oleh para pelaku pasar untuk mengelola risiko suku bunga.

Per akhir November 2024, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh investor dalam negeri dengan porsi kepemilikan 85,02 persen. Sementara, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,53 persen termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing. Lembaga keuangan domestik memegang kepemilikan SBN 41 persen, terdiri atas perbankan 18,9 persen, perusahaan asuransi dan dana pensiun 18,9 persen, serta reksadana 3,2 persen. Bagi lembaga keuangan, SBN berperan penting dalam memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas, serta menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko. Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia sekitar 25,3 persen yang antara lain digunakan sebagai

instrumen pengelolaan moneter. Sejalan dengan upaya pemerintah memperluas basis investor, inklusi keuangan dan peningkatan literasi keuangan masyarakat dari *savings society* menjadi *investment society*, kepemilikan investor individu di SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya di bawah 3 persen menjadi 8,9 persen per akhir November 2024. Sisa kepemilikan SBN domestik dipegang oleh institusi domestik lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan institusi bersangkutan.

Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (*Green Sukuk*) dan SDGs (*SDG Bond* dan *Blue Bond*). Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.

Calendar Events 2024

Penyusunan Kapasitas Fiskal
(*Resource Envelope*)
Penawaran SBN Ritel ORI025
Lomba Debat APBN - Mahasiswa
DJA Menyapa

Penyampaian Pagu
Indikatif RAPBN 2025
Penawaran SBN Ritel ST012
Lomba Debat APBN
- Mahasiswa
Lomba Konten APBN - SMP

Pembicaraan Pendahuluan
RAPBN TA 2025
Penyampaian Pagu
Anggaran RAPBN 2025
Penawaran SBN Ritel SBR013
Penawaran SBN
Ritel SWR005

01

JAN

•

FEB

02

03

MAR

•

APR

04

05

MAY

•

JUN

06

Penawaran SBN Ritel ORI025
DJA Menyapa

Penyusunan Kapasitas Fiskal
Penyampaian Pagu
Indikatif RAPBN 2025
Penawaran SBN Ritel SR020
Lomba Debat APBN - Mahasiswa
Budget Goes to Campus

Penyampaian Dokumen
KEM PPFT TA 2025
Penawaran SBN Ritel ST012
Penawaran SBN Ritel SBR013
Lomba Debat APBN - Mahasiswa
Lomba Konten APBN - SMP



Pidato Presiden dalam rangka
Penyampaian RUU APBN
2025 dan Nota Keuangan
Penawaran SBN Ritel SR021
Lomba Cerdas Cermat APBN - SMA
Lomba Video Mengajar
APBN - Guru SMA/SMP

Pembahasan RUU APBN
2025 dan Nota Keuangan
Penetapan Peraturan Presiden
tentang Rincian APBN TA 2025
Penawaran SBN Ritel ORI026
Lomba Video Mengajar
APBN - Guru SMA/SMP
Budget Goes to Campus
HORI 78 Tahun 2024

DJA Menyapa
Penawaran SBN Ritel ST013

07

09

11

12

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

08

10

Penyampaian Pagu
Anggaran RAPBN 2025
Penawaran SBN Ritel SBR013
Penawaran SBN Ritel SWR005
Lomba Cerdas Cermat
APBN - SMA
Lomba Video Mengajar
APBN - Guru SMA/SMP
Budget Goes to Campus

Pembahasan RUU APBN
2025 dan Nota Keuangan
Penawaran SBN Ritel SR021
Penawaran SBN Ritel ORI026
Lomba Cerdas Cermat APBN - SMA
Lomba Video Mengajar
APBN - Guru SMA/SMP
DJA Menyapa

Penetapan DIPA Tahun 2025
Penawaran SBN Ritel ST013

Laporan Khusus

Presiden Serahkan DIPA & Buku Alokasi Transfer ke Daerah 2025 Secara Digital

Jakarta, 10 Desember 2024 – Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama seluruh pimpinan tinggi negara, Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah hadir dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun Anggaran 2025 di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 10 Desember 2024.

Penyerahan DIPA secara digital dan Buku Alokasi TKD ini menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan dan telah mengakomodasi program prioritas presiden terpilih secara optimal.

Menteri Keuangan mengungkapkan, APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu

bangsa dan menjadi instrumen andalan dalam melindungi masyarakat serta perekonomian untuk menghadapi berbagai gejolak guncangan serta krisis. Oleh karena itu, menurutnya APBN harus terus dijaga kesehatan, kredibilitas, dan sustainabilitasnya.

“Alhamdulillah, Indonesia terus mampu menjaga keseimbangan antara upaya meraih kemajuan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dengan menjaga stabilitas dan sustainabilitas,” ungkap Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan memaparkan, APBN 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi tahun 2025 yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik. Perekonomian Indonesia di periode 2022 hingga 2024 diperkirakan tumbuh sekitar 5 persen. Sementara itu, inflasi di November 2024 berada di angka 1,55 persen (yoy), termasuk yang terendah di dunia. Neraca



perdagangan Indonesia mencapai surplus 54 bulan berturut-turut.

“Dengan capaian perekonomian yang relatif baik dan stabil hingga 2024 ini, akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi di 2025 dan 5 tahun ke depan,” tegas Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan menjelaskan, dalam APBN tahun depan belanja negara ditetapkan 3.621,3 triliun rupiah atau meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024. Belanja pemerintah pusat yang mencapai 2.701,4 triliun rupiah ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan. Selain itu, program unggulan 2025 juga telah ditampung di APBN melalui program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis,

renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah dan desa.

Transfer ke daerah 919,9 triliun rupiah mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif. Sementara, pendapatan negara tahun 2025 adalah sebesar 3.005,1 triliun dengan defisit 616,2 triliun rupiah atau 2,53 persen dari PDB.

Menteri Keuangan mengatakan, penyusunan DIPA telah melalui proses digitalisasi yang berhasil menyederhanakan proses pengesahan dari semula 12 tahap menjadi 4 tahap, dengan menggunakan aplikasi SAKTI. Ia pun berharap DIPA Kementerian, Lembaga dan daftar alokasi Transfer ke Daerah tahun 2025 dapat segera diselesaikan dan dilaksanakan. Sehingga pada awal tahun, masyarakat dan perekonomian dapat langsung merasakan manfaatnya secara maksimal.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati

hatian. "Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent dan hati hati dan terencana dengan baik. Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat. Dan saya mohon semua unsur, terutama para pimpinan daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat." Tegas Presiden Prabowo Subianto.

Puncak Hakordia Kemenkeu 2024

“Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju”

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba merupakan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto poin ketujuh. Dalam tema reformasi birokrasi sendiri, salah satu yang menjadi fokus pemerintah adalah Pemberantasan Korupsi dan Kebocoran Anggaran.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memastikan bahwa APBN dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Komitmen pengawasan terhadap keuangan negara oleh aparat penegak hukum, aparat pengawas internal maupun eksternal menjadi tema penting yang harus dilakukan oleh setiap unsur pengawasan.

Kemenkeu melalui Inspektorat Jenderal mewujudkan komitmen

ini, salah satunya dengan menyelenggarakan Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kemenkeu Tahun 2024 pada Kamis, 12 Desember 2024 secara hybrid. Tahun ini, Hakordia mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju.” Tema tersebut menjadi seruan bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen bersama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Peringatan kali ini, para perwakilan pejabat dari setiap Unit Eselon I, *Special Mission Vehicles* (SMV) dan Badan Layanan Umum (BLU), serta Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) hadir secara luring di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I. Sedangkan, para Kepala Kantor Unit Kerja Vertikal setara Eselon II dan Eselon III melalui Ms Teams, dan acara dapat diikuti oleh seluruh pegawai Kemenkeu melalui Yammer.



Peringatan Hakordia setiap 9 Desember ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya antikorupsi dalam setiap lini kehidupan. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Hakordia menjadi momen refleksi global tentang ancaman korupsi. Momen ini digunakan Kemenkeu untuk menegaskan komitmen dalam menghadapi tantangan integritas sehari-hari, mengingat godaan korupsi sangat nyata.

Dalam kesempatan baik ini, Menteri Keuangan menyampaikan arahan dan motivasi untuk seluruh jajaran punggawa Kemenkeu. “Saya berterima kasih hari ini Kementerian Keuangan terus berkomitmen untuk memperingati hari peringatan nyata dan serius tentang ancaman korupsi. Bagi Kementerian Keuangan, ini adalah sebuah tantangan yang sangat nyata sehari-hari,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

“Karena tugas kita sebagai pengelola keuangan negara, identik dengan sebuah godaan sangat nyata mengenai corruption. Di sinilah yang dianggap sebagai institusi yang seharusnya mengelola dan mengurus

keuangan negara dengan integritas yang tidak boleh dikompromikan,” lanjutnya mengingatkan kita sebagai pengelola keuangan negara harus terus menjaga integritas.

Menkeu Sri Mulyani mengingatkan pentingnya memegang teguh tiga prinsip utama dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara. Pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di Kemenkeu dalam menjalankan tugas negara.

“Tiga hal yaitu integrity yang saya selalu menyampaikan berkali-kali berulang-ulang, tak henti henti. *Integrity is our currency*. Yang kedua, yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia rakyat Indonesia adalah profesionalisme. Kompetensi Anda semuanya. Ketiga, masyarakat kita seluruh bangsa Indonesia, selalu melihat Kementerian Keuangan dengan optik harapan bahwa Kementerian ini harus mampu melayani: to serve, karena yang kita lakukan tidak boleh serving our own interest,” lanjut Menteri Keuangan.

Menkeu Sri Mulyani kembali menekankan kepada seluruh pegawai/pejabat Kemenkeu untuk terus berjuang melawan korupsi apapun

tantangan di masa mendatang. Perjuangan melawan korupsi merupakan jihad penting untuk Indonesia maju. Dengan berkomitmen, disiplin, dan saling bekerja sama, Kemenkeu berperan besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas.

Tantangan besar untuk menjaga perekonomian Indonesia membutuhkan komitmen semua pihak serta sinergi dan kerja sama internal dan eksternal Kemenkeu, khususnya dalam penguatan integritas dan semangat antikorupsi, termasuk menindak pegawai yang melakukan penyimpangan/pelanggaran integritas.

Dalam arahannya, Menkeu Sri Mulyani menyelipkan pesan untuk para penerima penghargaan. “WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) adalah indikator reputasi. Namun, penghargaan ini harus dipertahankan melalui komitmen yang konsisten, bukan hanya sekadar simbol,” kata beliau.

Selain menyampaikan keynote speech dan pembukaan, Menteri Keuangan juga memberikan penghargaan terkait Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penghargaan yang diberikan yaitu kepada: 3 Unit Kerja Terbaik Membangun ZI Menuju WBK, 3 Unit Kerja Terbaik Menjaga Keberlanjutan ZI Menuju WBK, 3 Unit Kerja Terbaik Menjaga Keberlanjutan ZI Menuju WBBM, serta 3 Unit Kerja Terbaik dalam Kepatuhan dan Validitas Administratif Pelaporan Harta Kekayaan.

Predikat WBK/WBBM bukan hanya sebagai ritual formalitas belaka, tetapi harus mencerminkan komitmen nyata terhadap budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Seluruh unit kerja yang menerima penghargaan ini telah melalui proses penilaian yang

panjang dan berjenjang, termasuk kolaborasi erat dengan Tim Penilai Nasional yang dikoordinir oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh dalam laporan penyelenggaraannya menyampaikan bahwa seluruh Unit Eselon I, LNSW, BLU, dan SMV, baik di pusat maupun di tingkat unit vertikal turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Hakordia tahun 2024. Sebanyak 51 kegiatan telah diselenggarakan dalam bentuk Road to Hakordia 2024 dan diikuti sebanyak 55.128 peserta.

Sepanjang 2024, Kemenkeu telah melakukan penguatan integritas secara berkelanjutan antara lain dalam bentuk kegiatan: Forum Integritas Pimpinan, *Integrity Sharing*, *E-Learning* Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi, Penanganan Benturan Kepentingan, Recovering Integrity, serta Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi.

Di akhir laporannya, Irjen Awan juga menyampaikan beberapa penghargaan yang diraih oleh Kemenkeu dalam peringatan Hakordia tahun 2024 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan terkait penyuluhan antikorupsi, antara lain (1) Kementerian Teraktif dalam Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi; (2) PAKSI API Dana Rakca sebagai Forum Teraktif; (3) Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Inspiratif (Sdri. Kusuma Santi Wahyuningsih); dan (4) Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Kreatif (Sdri. Azizah Nuur Utami dan Sdri. Aniek Juliarini).

Kemenkeu juga memperoleh Penghargaan dari KPK tahun 2024 sebagai (1) Unit Pengendalian Gratifikasi Peringkat 1 Klasifikasi Kementerian; (2) Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik Peringkat 3 Nasional; (3)

Instansi dengan Pelaporan Gratifikasi Terbanyak level K/L; dan (4) Instansi dengan Pelaporan Gratifikasi Terbanyak secara nasional dalam lingkup K/L Pemerintah Daerah dan BUMN.

Kegiatan peringatan Hakordia Kemenkeu 2024 sebagai sarana untuk meneguhkan komitmen pejabat/pegawai di lingkungan Kemenkeu dalam meningkatkan integritas dan memperkuat budaya antikorupsi. Dengan begitu, kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan negara semakin meningkat.

Annual International Forum On Economic Development and Public Policy (AIFED) ke 13

Growth Strategies in Navigating Geoeconomic Shifts

Badan Kebijakan Fiskal telah menyelenggarakan *Annual International Forum on Economic Development and Public Policy* (AIFED) ke-13 diselenggarakan pada 2–3 Desember 2024. Forum tahunan ini mengundang para ahli, baik nasional maupun internasional, serta didukung oleh mitra strategis Indonesia seperti Pemerintah Australia melalui Prospera, *Asian Development Bank* (ADB), *Asian Development Bank Institute* (ADBI), dan GIZ Jerman. Selain itu, acara ini juga mendapat dukungan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidato kuncinya menekankan pentingnya memahami Perubahan lanskap ekonomi global, perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan agenda nasional. “Saya

berharap momen ini menjadi waktu yang sangat penting bagi kita untuk lebih memahami dan merespons pergeseran geoekonomi ini dengan baik. Khususnya memastikan bahwa kinerja ekonomi Indonesia tidak hanya mencakup pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas hidup, dan pemerataan.”

Selama dua hari penyelenggaraan, AIFED ke-13 telah mendiskusikan berbagai isu strategis, mulai dari pergeseran geoekonomi global, keterampilan masa depan, hingga tantangan dan peluang dalam transisi hijau dan digitalisasi. diskusi dalam AIFED ke-13 ini juga menyoroti peningkatan tren industrialisasi global, serta pentingnya Indonesia merumuskan kebijakan yang tepat dan berkolaborasi dengan negara lain. Ketahanan pangan juga menjadi salah satu fokus utama, dengan penekanan pada sinergi kebijakan yang mendukung pengembangan SDM sesuai dengan tujuan nasional.



Transformasi ekonomi merupakan elemen penting dalam mencapai aspirasi Indonesia Maju 2045. Reformasi struktural yang dilakukan Indonesia telah menciptakan daya tahan ekonomi, disiplin fiskal yang berkelanjutan, posisi eksternal yang kuat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pencapaian tujuan ekonomi Indonesia membutuhkan penguatan institusi dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Hakordia 2024: Dengan Semangat Antikorupsi, Kita Jaga Uang Kita Demi Kesejahteraan Rakyat

Desember merupakan bulan sangat istimewa. Pertama, ini merupakan periode tutup tahun, sehingga kita harus menggenjot semangat demi mencapai kinerja optimal. Target yang telah dicanangkan harus kita raih dengan capaian apik. Kedua, oleh komunitas global, 9 Desember dirayakan sebagai Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Bersama institusi lainnya, Kementerian Keuangan menyambut Hakordia dengan semarak.

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang harus diperangi secara serius. Ia merupakan tindak pidana berat, seperti halnya pencucian uang, perdagangan narkoba,

penyelundupan manusia, kejahatan perang, dan bahkan genosida. Betul, korupsi dapat melenyapkan sebuah generasi. Dampak yang masif dan destruktif, korupsi bisa menggerogoti triliunan rupiah, baik anggaran negara maupun anggaran daerah. Anggaran tersebut, Uang Kita itu, mestinya bisa dikelola untuk menyejahterakan rakyat melalui pembangunan di berbagai sektor untuk dapat dinikmati oleh generasi di masa yang akan datang.

Betapa kita memerlukan penerimaan negara dan mengelola belanja negara secara cermat, demi menyediakan fasilitas publik seperti terminal, bendungan, saluran irigasi, infrastruktur, renovasi gedung sekolah,

sarana kesehatan, akses transportasi, program perlindungan sosial, pencegahan tengkes (*stunting*) dan penanganan TBC, dan sebagainya. Segala cita-cita luhur tersebut bisa hancur lantaran maraknya praktik rasuah.

Terdepan Perangi Korupsi

Untungnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan institusi terdepan dalam memberantas korupsi. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tahun lalu Kemenkeu meraih nilai SPI tertinggi di antara institusi kategori kementerian. Kemenkeu berhasil meraih indeks SPI 84,18 dengan predikat Terjaga (di atas 77,5). SPI merupakan bagian dari upaya untuk memetakan risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tentu kita berharap tahun ini Kemenkeu mampu mempertahankan indeks SPI pada level “Terjaga” dengan nilai indeks yang lebih baik.

Kunci dari komitmen memerangi korupsi adalah integritas. Hal ini selaras dengan nilai-nilai Kemenkeu, yang terdiri atas integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Sangatlah penting menempatkan integritas sebagai nilai pertama. Karena dengan integritaslah kita dapat menjaga pikiran, niat, ucapan, dan perbuatan kita dari tindakan tercela yang melanggar ketentuan, termasuk tindakan korupsi.

Sudah sangat tepat bahwa Kemenkeu merumuskan tiga lapis pertahanan, yang dikenal dengan “*three lines of defense*”. Lini pertama adalah diri kita sendiri. Kita sendirilah yang sadar akan risiko *fraud* sesuai dengan kriteria tugas dan fungsi masing-masing. Kita harus sadar, bahwa setiap individu dari kita justru merupakan pemain kunci dalam memerangi korupsi. Dengan menjauhi korupsi sejak dini serta berawal

dari diri sendiri, kita telah mencegah terjadinya *fraud* dari awal. Lini kedua adalah unit kepatuhan internal (UKI), yang melaksanakan pengawasan pada masing-masing unit kerja. Dan lini terakhir adalah Inspektorat Jenderal, yang menyelenggarakan asurans bahwa kepatuhan internal berjalan dengan baik.

Selain tiga lapis pertahanan itu tadi, kita juga mengenal “trisula” pemberantasan korupsi. Pertama, upaya edukasi dan kampanye antikorupsi. Tindakan ini antara lain dengan memberdayakan para penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas (paksiapi). Kita patut berbangga bahwa Kemenkeu memiliki Forum Paksiapi Dana Rakca, yang beranggotakan lebih dari 400 paksiapi. Forum ini merupakan organisasi paksiapi terbesar dari segi jumlah anggota, di antara seluruh forum paksiapi di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kedua, usaha pencegahan korupsi dengan menerapkan *three lines of defense* itu tadi serta penguatan UKI. Penyempurnaan *standard operating procedure* demi kualitas layanan juga termasuk ranah pencegahan korupsi. Dan ketiga adalah penindakan. Kemenkeu tidak menoleransi tindakan *fraud* dengan berkoordinasi bersama aparat penegak hukum maupun KPK.

Mengelola lebih dari Rp3.000 triliun APBN, baik dari sisi penerimaan maupun dari segi pembelanjaan, memang memerlukan insan-insan militan yang berintegritas dan berpegang teguh pada nilai-nilai antikorupsi. Dan terbukti bahwa Kemenkeu senantiasa terdepan dalam menggelorakan semangat antikorupsi.

Sekali lagi, selamat merayakan Hari Antikorupsi Sedunia 2024! Uang Kita untuk Kesejahteraan Rakyat!

Dirjen Perbendaharaan Hadiri Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI di Jawa Timur

Dirjen Perbendaharaan menghadiri Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR RI ke Provinsi Jawa Timur pada Kamis (28/11). Bertempat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto membahas isu-isu strategis, seperti perkembangan ekonomi dan fiskal, realisasi dana transfer, dan persoalan disparitas fiskal di Jawa Timur. Selain Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, pada forum tersebut hadir Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, seluruh Kepala Daerah dan Penjabat Kepala Daerah lingkup Provinsi Jawa Timur, seluruh pimpinan Kemenkeu Satu

Provinsi Jawa Timur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, serta para pejabat pendamping.

Dalam sambutannya, Wihadi Wiyanto menyampaikan apresiasi kepada para undangan atas kontribusi mereka dalam forum diskusi ini. Wihadi menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai realisasi dana transfer, progres perpajakan, kredit perbankan, serta tantangan ekonomi yang dihadapi provinsi tersebut.

Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono juga turut memaparkan gambaran ekonomi provinsi yang menunjukkan pertumbuhan positif



meskipun menghadapi tantangan global dan nasional. Adhy menyebut UMKM dan sektor industri sebagai tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Sektor agroindustri di Jawa Timur memberikan kontribusi signifikan, bahkan menopang kebutuhan 16 provinsi lain di Indonesia.

Adhy juga menyoroti permasalahan utama, yakni disparitas fiskal antardaerah. Sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur masih bergantung pada dana transfer akibat rendahnya kapasitas fiskal. Selain itu, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang salah satunya disebabkan oleh penurunan dana bagi hasil pajak. Meskipun demikian, realisasi dana bagi hasil mencapai rata-rata serapan di atas 90 persen. Untuk Dana Desa, realisasinya telah mencapai 99,19 persen dari pagu sebesar Rp8,2 triliun. Adhy menekankan bahwa fokus ke depan adalah memastikan dana tersebut benar-benar mendukung program pengentasan

kemiskinan ekstrem di desa-desa.

Dalam forum tersebut, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan apresiasi kepada Ketua Tim Banggar DPR RI dan Penjabat Gubernur Jawa Timur atas kolaborasi yang terjalin baik selama ini. Dirjen Perbendaharaan juga memaparkan capaian fiskal di Provinsi Jawa Timur.

“Capaian fiskal hingga saat ini, Pendapatan perpajakan telah mencapai Rp96,96 triliun atau 74 persen dari target, Bea Cukai mencatatkan realisasi Rp107 triliun atau 71 persen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp6,9 triliun, yang telah melampaui target. Dari sisi belanja, penyerapan anggaran di Kementerian/Lembaga telah mencapai Rp40,33 triliun atau sekitar 72,46 persen, sementara Transfer ke Daerah (TKD) telah terserap Rp70,79 triliun atau 87,4 persen,” jelas Dirjen Perbendaharaan.

Lebih lanjut, Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Jawa Timur yang juga Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Sigit Danang Joyo juga menjelaskan terkait kontribusi signifikan dari dana transfer untuk mendukung berbagai

meskipun menghadapi tantangan global dan nasional. Adhy menyebut UMKM dan sektor industri sebagai tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Sektor agroindustri di Jawa Timur memberikan kontribusi signifikan, bahkan menopang kebutuhan 16 provinsi lain di Indonesia.

Adhy juga menyoroti permasalahan utama, yakni disparitas fiskal antardaerah. Sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur masih bergantung pada dana transfer akibat rendahnya kapasitas fiskal. Selain itu, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang salah satunya disebabkan oleh penurunan dana bagi hasil pajak. Meskipun demikian, realisasi dana bagi hasil mencapai rata-rata serapan di atas 90 persen. Untuk Dana Desa, realisasinya telah mencapai 99,19 persen dari pagu sebesar Rp8,2 triliun. Adhy menekankan bahwa fokus ke depan adalah memastikan dana tersebut benar-benar mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem di desa-desa.

Dalam forum tersebut, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan apresiasi kepada Ketua Tim Banggar DPR RI dan Penjabat Gubernur Jawa Timur atas kolaborasi yang terjalin baik selama ini. Dirjen Perbendaharaan juga memaparkan capaian fiskal di Provinsi Jawa Timur.

“Capaian fiskal hingga saat ini, Pendapatan perpajakan telah mencapai Rp96,96 triliun atau 74 persen dari target, Bea Cukai mencatatkan realisasi Rp107 triliun atau 71 persen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp6,9 triliun, yang telah melampaui target. Dari sisi belanja, penyerapan anggaran di Kementerian/Lembaga telah mencapai Rp40,33 triliun atau sekitar 72,46 persen,

sementara Transfer ke Daerah (TKD) telah terserap Rp70,79 triliun atau 87,4 persen,” jelas Dirjen Perbendaharaan.

Lebih lanjut, Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Jawa Timur yang juga Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Sigit Danang Joyo juga menjelaskan terkait kontribusi signifikan dari dana transfer untuk mendukung berbagai program strategis. Kemenkeu mencatat realisasi belanja infrastruktur yang mendukung pembangunan konektivitas jalan, jembatan, irigasi, dan proyek strategis nasional seperti Bendungan Bagong serta Jalur Ganda Kereta Api Madiun-Surabaya.

Dalam sesi diskusi, berbagai pandangan dan masukan disampaikan oleh anggota DPR RI, perwakilan pemerintah daerah, dan pejabat lainnya. Anggota Banggar DPR RI Charles Meikyansah menggarisbawahi pentingnya peran UMKM dalam mendukung perekonomian daerah. Pihaknya berharap pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan dapat bersinergi dalam mendorong pertumbuhan sektor ini.

Sementara itu, anggota Banggar Ratna Juwita menyoroti tantangan dalam optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Beberapa perwakilan pemerintah daerah, seperti Penjabat Bupati Bangkalan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi juga turut menyampaikan persoalan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan ketimpangan alokasi DBH antarkabupaten.

Forum ditutup dengan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan solusi konkret terhadap tantangan

ekonomi dan fiskal di Jawa Timur. Ketua Tim Kunjungan Kerja Wihadi Wiyanto meminta pihak Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi, dan Bank Indonesia untuk memberikan jawaban tertulis atas berbagai pertanyaan yang diajukan selama diskusi.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu mengatasi tantangan fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di masa mendatang.

Momentum Konsolidasi Tim Implementasi Penguatan RCE Tingkat Pusat

Agenda SDGs ini dicanangkan dan tDirektorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) kembali menegaskan komitmen dalam memperkuat *Regional Chief Economist* (RCE) melalui kegiatan Rapat Konsolidasi Tim Implementasi Penguatan RCE Tingkat Pusat yang digelar pada Kamis (05/12) di Aula Gedung Jusuf Anwar, Jakarta. Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti selaku Ketua Tim Penguatan (TP) RCE ini diikuti oleh anggota tim implementasi RCE dari berbagai unit eselon (UE) I lingkup Kementerian Keuangan yaitu para pejabat dan pegawai dari DJPb, Direktorat Jenderal

Anggaran (DJA), Inspektorat Jenderal (Itjen), Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko (DJPPR) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Turut juga hadir Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Dalam arahnya, Dirjen Perbendaharaan menekankan pentingnya peran RCE dalam mendukung pengambilan keputusan



kebijakan fiskal di tingkat daerah. Dirjen Perbendaharaan juga menyampaikan harapan agar RCE tidak hanya menjadi forum untuk menghasilkan laporan, tetapi juga sebagai wadah untuk merumuskan kebijakan dan kegiatan yang lebih konkret dan bermanfaat bagi daerah dengan melibatkan seluruh UE I Kemenkeu di daerah.

Peran RCE mulai dijalankan pada tahun 2021 oleh seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb bersama Kanwil UE I Kemenkeu lainnya. Peran RCE dijalankan sebagai respons dari arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar DJPb terus bertransformasi ke arah *treasury business* yang lebih mengoptimalkan data dalam merumuskan policy recommendation. Melalui RCE, peran unit vertikal Kemenkeu di daerah didorong untuk mendukung perekonomian regional melalui analisis dan komunikasi dengan pemerintah daerah.

Program RCE telah menghasilkan berbagai output strategis yaitu Kajian Fiskal Regional (KFR), Laporan Asset Liability Committee (ALCo) Regional, Forum Koordinasi Pengelolaan

Kuangan Negara (FKPKN), dan *Strategic Briefsheet*. “RCE bukan hanya milik DJPb, melainkan milik kita semua yang harus kita jaga dan rawat bersama. Laporan RCE saat ini seringkali hanya berisi data yang sama dengan laporan BKF dan DJPK. Padahal, RCE seharusnya dapat memberikan analisis yang lebih mendalam tentang kondisi ekonomi daerah dan langkah-langkah strategis yang perlu diambil,” ujar Dirjen Perbendaharaan.

Dirjen Perbendaharaan menambahkan bahwa perkembangan RCE saat ini sudah sangat baik, tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya sinergi antara berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan RCE.

Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan monitoring yang lebih ketat terhadap pelaksanaan RCE di daerah. Selain itu, laporan RCE perlu diperkaya dengan informasi yang lebih spesifik dan relevan dengan kebutuhan daerah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan daerah akan pengetahuan tentang tata kelola

birokrasi pemerintahan yang efektif. RCE dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait tata kelola pemerintahan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

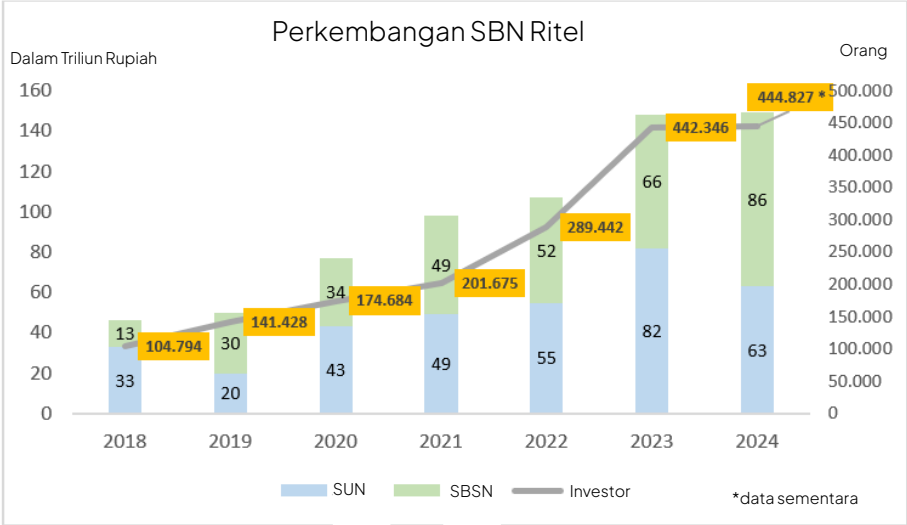
Dirjen Perbendaharaan pun menekankan pentingnya peran RCE dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah, terutama di masa pemerintahan baru ini. RCE dapat lebih proaktif dalam mengartikulasikan berbagai kebijakan dan membantu memastikan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam kegiatan ini hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Arif Wibawa, Direktur Pelaksanaan Anggaran Tri Budhianto selaku Koordinator KFR, Direktur Pengelolaan Kas Negara Muhdi selaku Koordinator ALCo Regional, Direktur Sistem Perbendaharaan Sulaimansyah selaku Koordinator FKPN, serta para pejabat eselon II Kemenkeu.

SBN Ritel: Mendukung Pembiayaan APBN, Mendorong Investasi Masyarakat

Dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian global, APBN berperan krusial sebagai shock absorber guna melindungi rakyat dan menstabilkan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif yang menimbulkan konsekuensi defisit fiskal. Defisit tersebut sebagian dipenuhi melalui utang, yang dikelola secara hati-hati untuk menjaga rasio utang tetap aman dan *prudent* sesuai ketentuan yang berlaku. Surat Berharga Negara (SBN) menjadi instrumen utama dalam pembiayaan utang pemerintah, menyumbang 88,12 persen dari total *outstanding* utang pemerintah pusat hingga akhir November 2024.

Di antara berbagai jenis SBN, SBN Ritel cukup pesat perkembangannya sebagai instrumen yang tak hanya berkontribusi mendukung pembiayaan APBN, namun juga menawarkan peluang investasi bagi masyarakat. SBN Ritel merupakan instrumen investasi yang diterbitkan pemerintah, dan ditawarkan kepada individu Warga Negara Indonesia (WNI). Dengan karakteristiknya yang aman, menguntungkan, dan mudah diakses, SBN Ritel memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan negara sembari meraih manfaat finansial. Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi dan



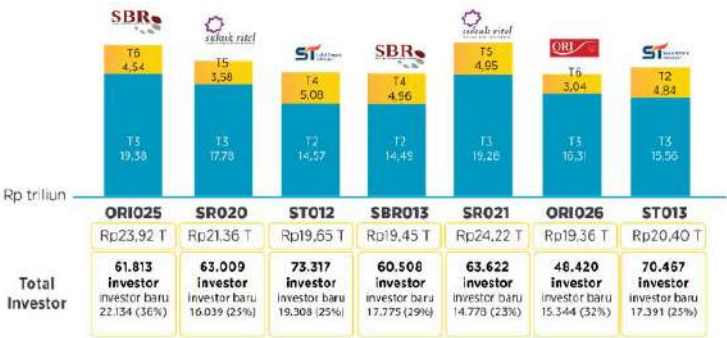
inklusi keuangan, memperluas basis investor domestik, serta meningkatkan kemandirian pembiayaan nasional.

Sejak pertama kali diluncurkan melalui Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI001 pada 2006, SBN Ritel telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pemerintah secara konsisten menghadirkan inovasi untuk menarik lebih banyak investor. Salah satunya adalah pengembangan platform e-SBN yang memudahkan masyarakat untuk membeli SBN Ritel secara *online*, di mana pun dan kapanpun, selama masa penawaran. Kehadiran e-SBN tidak hanya meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat transparansi dalam proses investasi dengan adanya mekanisme *first come, first served*.

Perkembangan jenis dan fitur SBN Ritel juga semakin beragam guna memenuhi preferensi dan kebutuhan investor. Saat ini, terdapat 5 (lima) jenis SBN Ritel, yaitu: Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Ritel (Sukri), Savings Bond Ritel (SBR), Sukuk Tabungan (ST), serta Sukuk Wakaf Ritel (SWR) yang berbasis investasi sosial. Selain itu, pemerintah telah memperkenalkan fitur dual tenor sejak 2023, yang memberikan fleksibilitas kepada investor untuk

memilih jangka waktu investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah juga memadukan SBN Ritel dengan prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*), yaitu Sukuk Tabungan bertema *Green* sejak 2019 (ST006), dan Obligasi Negara Ritel bertema SDGs pada 2024 (ORI026). Langkah ini menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk upaya penanganan dampak perubahan iklim.

Selama tahun 2024, pemerintah telah menerbitkan 7 (tujuh) seri SBN Ritel dengan total Rp148,36 triliun dan menjangkau 444.210 investor, yaitu seri ORI025, SR020, ST012, SBR013, SR021, ORI026, dan ST013. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Sukuk Wakaf Ritel seri SWR005 dengan total Rp147,37 miliar dari 619 wakif, baik individu maupun institusi. Dengan capaian tersebut, SBN Ritel menunjukkan tren pertumbuhan, baik pada nominal yang diterbitkan dan jumlah investor yang berpartisipasi. Peningkatan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap SBN Ritel sebagai instrumen investasi yang aman, menguntungkan, dan mudah diakses.



Ke depan, peran SBN Ritel sebagai alat pembiayaan APBN dan instrumen investasi akan terus ditingkatkan seiring upaya literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Pemerintah akan terus melakukan *campaign* edukasi dan sosialisasi untuk mendorong masyarakat lebih melek investasi. Dengan partisipasi masyarakat yang lebih luas melalui SBN Ritel, pemerintah berharap tercipta sebuah *investment society* yang mampu mendukung pembiayaan APBN secara lebih berkelanjutan, stabil, dan inklusif.

Patma Bersinar 2024, Operasi Bea Cukai Ungkap Lebih dari 900 Kilogram Narkotika

Bea Cukai, bersama Polri, BNN, dan BPOM, melaksanakan operasi Patroli Bersama Berantas Sindikat Narkotika (Patma Bersinar) 2024. Berlangsung dari 30 September hingga 30 Oktober 2024, operasi ini melibatkan seluruh unit vertikal Bea Cukai di tingkat nasional. Hasilnya, 117 penindakan berhasil dilakukan dengan total barang bukti mencapai 913,355 kilogram berupa narkotika, psikotropika, prekursor (NPP), dan obat-obatan terlarang (OOT).

Capaian ini mencatat hasil tertinggi dalam empat tahun terakhir, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan 2023 yang mencatatkan

64 kasus dengan total barang bukti 772,35 kilogram. Pencapaian tersebut mencerminkan efektivitas operasi serta peningkatan intensitas pengawasan terhadap sindikat narkotika.

Barang bukti yang diamankan mencakup berbagai jenis, dengan ganja mendominasi sebanyak 693.920,73 gram. Selain itu, ditemukan methamphetamine seberat 99.746,93 gram dan MDMA seberat 3.078 gram. Dari segi wilayah, Riau mencatatkan penindakan terbesar dengan total 632.596 gram, diikuti oleh Jakarta sebanyak 105.617 gram dan Sumatra Utara dengan 43.775 gram.



Keberhasilan Patma Bersinar 2024 dinilai sebagai bukti komitmen kuat Bea Cukai dan instansi terkait dalam mendukung Asta Cita ke-7 yang dicanangkan Presiden RI, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Program ini juga diharapkan memberikan *deterrent effect* bagi sindikat narkoba.

Selain efektivitas operasi, Patma Bersinar 2024 memperkuat sinergi antarinstansi demi menjaga keamanan masyarakat dari ancaman narkoba. Operasi ini diperkirakan menyelamatkan 1.068.052 jiwa, menjadi wujud nyata perlindungan terhadap generasi muda dari bahaya obat-obatan terlarang.

Dengan keberhasilan ini, Bea Cukai menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas patroli bersama dan memastikan keamanan nasional dari peredaran narkoba di masa mendatang.

Bea Cukai: Operasi *Thunder* dan *Demeter* 2024 untuk Lindungi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Indonesia

Selaras dengan semangat Asta Cita dan fungsi Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, Bea Cukai terus berpartisipasi dalam dua operasi tahunan berskala internasional, Operasi *Thunder* dan *Demeter*, sebagai upaya melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati. Operasi ini melibatkan kerja sama dengan lembaga internasional seperti *World Customs Organization* (WCO) dan Interpol.

Operasi *Thunder*, yang dimulai sejak 2017, berfokus pada pemberantasan perdagangan ilegal tumbuhan, satwa liar, dan kayu, terutama spesies yang dilindungi sesuai CITES.

Sementara itu, Operasi *Demeter* yang pertama kali diselenggarakan pada 2009, menargetkan pengawasan perdagangan lintas batas limbah berbahaya, bahan perusak ozon, serta komoditas lain yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Operasi *Thunder* dibagi dalam tiga fase pada tahun 2024 dan awal 2025: praoperasional (1 September – 10 November), operasional (11 November – 6 Desember), dan pascaoperasional (7 Desember 2024 – 15 Januari 2025). Operasi *Demeter* berlangsung lebih awal, dengan fase praoperasional dari 1 Mei hingga 14 Juli, fase operasional pada 15 Juli hingga 15 September, dan fase pascaoperasional dari 16



September hingga 15 November.

Melihat hasil operasi sebelumnya, pada 2023, Bea Cukai mencatat keberhasilan signifikan dalam kedua operasi. Dalam Operasi Thunder, Bea Cukai menindak 372 ton kayu ilegal, 5 ton rotan, 5 ekor kakatua jambul kuning, 53 kg sisik trenggiling, 330 kg teripang laut, serta 4 gading gajah Afrika. Sementara dalam Operasi Demeter, penindakan dilakukan terhadap 930 bale pakaian bekas kategori limbah B3 dan 300 boks bahan perusak ozon.

Melalui partisipasi dalam kedua operasi ini, Bea Cukai menegaskan komitmennya sebagai community protector, mendukung upaya global melawan kejahatan lingkungan. Masyarakat juga diimbau untuk turut berperan dengan tidak memperjualbelikan produk satwa liar yang dilindungi, melaporkan aktivitas ilegal yang merusak lingkungan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keanekaragaman hayati. Dengan sinergi ini, kekayaan alam Indonesia dan dunia dapat terus terjaga.

Anugerah Reksa Bandha, Apresiasi Kemenkeu kepada *Stakeholders* Berprestasi

Kementerian Keuangan kembali memberikan penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada Kementerian dan Lembaga Negara (K/L) dan stakeholders berprestasi di bidang pengelolaan barang milik negara (BMN) dan lelang, pada Kamis (5/12) di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan. Anugerah Reksa Bandha 2024 terdiri atas 4 kategori penghargaan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan 4 kategori di bidang lelang. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas kualitas kinerja dan koordinasi yang baik antara K/L dan para stakeholders Kemenkeu terhadap pengelolaan BMN dan

pelayanan lelang di 2023–2024.

Acara Anugerah Reksa Bandha 2024 diselenggarakan berlandaskan semangat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada kementerian/ lembaga yang telah melakukan kinerja pengelolaan BMN terbaik sesuai kategori dan kelompok tertentu. Selain itu, acara ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif pada pemangku kepentingan jasa lelang yang telah melakukan kinerja lelang terbaik.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan selamat dan apresiasinya kepada para penerima



penghargaan Anugerah Reksa Bandha 2024 dan seluruh pengguna BMN dan pelaku lelang di Indonesia. “Saya menyampaikan terima kasih kepada kepada seluruh pengguna Barang Milik Negara, seluruh pelaku lelang di Indonesia yang telah meneruskan dan menjaga integritas”, ungkapnya.

Suahasil mengatakan, acara penganugerahan ini merupakan manifestasi dari pelaksanaan mandat sebagai pengelola dan pengguna BMN. Dengan mandat tersebut, pengelola dan pengguna BMN bertanggung jawab menggunakan BMN untuk menyelenggarakan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Keuangan terus untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan BMN. Komitmen untuk melakukan penyempurnaan pelayanan kepada para stakeholder dilakukan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Untuk mewujudkan Transformasi Digital dalam pemerintahan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan SIMAN V2 sebagai Aplikasi Umum SPBE bidang Pengelolaan Kekayaan Negara melalui KepmenPANRB Nomor 487/2024. Dengan terbitnya KepmenPANRB ini diharapkan seluruh proses pengelolaan BMN dapat berjalan secara lebih terintegrasi, cepat, dan tanpa hambatan.

Elemen lain dari Anugerah Reksa Bandha adalah lelang. Selain sebagai bagian dari pengelolaan aset negara, lelang juga memiliki peran dalam meningkatkan investasi, mendukung kegiatan penegakan hukum, dan membantu penyelesaian non-performing loan di berbagai macam institusi keuangan.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terus melakukan transformasi pelayanan lelang melalui aplikasi Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id.) dan mendorong peran swasta dalam pelayanan lelang sehingga dapat terus mendukung perekonomian nasional. Portal Lelang Indonesia yang juga biasa disebut e-Auction

di 2024 mendapatkan penghargaan dari KemenPANRB sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Berkelanjutan 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan terhadap inovasi e-Auction untuk meningkatkan pelaksanaan lelang yang efisien, kompetitif, dan adil.

Adapun penerima penghargaan Anugerah Rekso Bandha 2024, adalah sebagai berikut:

A. Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

1. Kategori Utilisasi BMN

Kelompok 1

Juara 1: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Juara 2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Juara 3: Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kelompok 2

Juara 1: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Juara 2: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Juara 3: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Kelompok 3

Juara 1: Kementerian Keuangan

Juara 2: Badan Pusat Statistik

Juara 3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

2. Kategori Kualitas Pelaporan BMN

Kelompok 1

Juara 1: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Juara 2: Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Juara 3: Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Kelompok 2

Juara 1: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Juara 2: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Juara 3: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Kelompok 3

Juara 1: Komisi Pemilihan Umum

Juara 2: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Juara 3: Badan Narkotika Nasional

3. Kategori Sertifikasi BMN

Kelompok 1

Juara 1: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Juara 2: Ombudsman Republik Indonesia

Juara 3: Badan Informasi Geospasial

Kelompok 2

Juara 1: Kementerian Sekretariat Negara

Juara 2: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Juara 3: Badan Kepegawaian Negara

Kelompok 3

Juara 1: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Juara 2: Kementerian Perhubungan

Juara 3: Kementerian Agama

4. Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (Continuous Improvement)

Juara 1: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Juara 2: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Juara 3: Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. Bidang Lelang

1. Penjual Lelang Eksekusi Terbaik

Kelompok 1

Juara 1: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Juara 2: PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

Juara 3: PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Kelompok 2

Juara 1: Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Juara 2: PT Bank Central Asia, Tbk

Juara 3: PT Bank Syariah Indonesia, Tbk

2. Penjual Lelang Noneksekusi Terbaik

Kelompok 1

Juara 1: Kementerian Keuangan

Juara 2: Kepolisian Republik Indonesia

Juara 3: Kementerian Agama

Kelompok 2

Juara 1: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Juara 2: Komisi Pemilihan Umum

Juara 3: Kementerian Dalam Negeri

3. Balai Lelang dengan Tata Kelola Terbaik

Juara 1: PT Balai Lelang Serasi

Juara 2: PT Mega Armada Sudeco

Juara 3: PT Balai Lelang Megatama

4. Pejabat Lelang Kelas II Berkinerja Terbaik

Juara 1: Cari Azhari, S.H.

Juara 2: Ir. Chitra W. Mukhsin

Juara 3: Dr. H. Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, S.H.

Menyongsong Era Baru Sistem Coretax di Indonesia

Sejak Januari 2025, sistem perpajakan Indonesia akan menggunakan sistem Coretax yang menawarkan berbagai kemudahan bagi wajib pajak. Saat ini, wajib pajak menggunakan beberapa aplikasi untuk menunaikan hak dan kewajiban perpajakannya. Melalui sistem Coretax, wajib pajak cukup mengakses Portal Wajib Pajak.

Sistem Coretax dirancang untuk menyatukan semua proses bisnis perpajakan dalam satu aplikasi berbasis *website*, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak. Dengan integrasi tersebut, data

perpajakan akan terpusat, sehingga akan meningkatkan akurasi data serta efisiensi administrasi perpajakan.

Melalui menu Notifikasi pada Portal Wajib Pajak, wajib pajak dapat memantau status perpajakannya, riwayat pembayaran, serta data interaksinya dengan DJP secara real-time. Sistem Coretax memberikan akses data perpajakan yang lebih transparan kepada wajib pajak.

Selain itu, Coretax juga mempermudah proses pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Dalam proses pelaporan SPT berstatus Kurang Bayar, Coretax merekonsiliasi dan melakukan validasi data SPT Kurang Bayar dengan

data pembayaran secara otomatis. Saat data NTPN dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan diterima, status draft SPT Kurang Bayar akan berubah menjadi submit (dilaporkan). Wajib pajak maupun petugas tidak perlu lagi memasukkan data NTPN atau bukti PBK secara manual. Otomatisasi ini mengurangi pekerjaan manual, baik di sisi petugas pajak maupun wajib pajak, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya kesalahan.

Sistem Coretax juga memperkenalkan akun Deposit Pajak yang dapat digunakan untuk melunasi berbagai kewajiban terkait pembayaran pajak, seperti pembayaran untuk draft SPT, utang pajak, atau kewajiban pembayaran di luar SPT.

Sebagai dasar hukum yang mengatur secara teknis tentang pelaksanaan Coretax, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Peraturan ini merupakan aturan turunan dari Perpres Nomor 40/2018. Untuk penjelasan lebih rinci terkait ketentuan dalam PMK-81/PMK.03/2024, akan diterbitkan Peraturan Dirjen Pajak.

Proses Pendaftaran Akun Portal Wajib Pajak

Untuk dapat mengakses Portal Wajib Pajak, wajib pajak yang sebelumnya telah terdaftar dalam sistem DJP Online tidak perlu mendaftar ulang. Data wajib pajak dari sistem sebelum Coretax telah dimigrasikan ke sistem Coretax. Untuk mengakses Portal Wajib Pajak, wajib pajak yang sebelumnya telah terdaftar dalam sistem DJP Online harus melakukan *reset password*.

Setelah melakukan reset password, notifikasi akan dikirim

secara otomatis ke alamat email yang terdaftar di DJP Online, pada menu Profil. Wajib pajak harus memastikan data alamat email pada menu Profil DJP Online saat ini sudah sesuai dan valid, untuk mencegah kendala dalam proses transisi ke sistem Coretax.

Perlu menjadi catatan bahwa proses *reset password* ini hanya berlaku bagi wajib pajak yang sudah memiliki akun DJP Online. Bila wajib pajak lama belum pernah aktivasi EFIN, atau sudah pernah aktivasi EFIN tetapi tidak melakukan registrasi akun DJP Online, maka wajib pajak tersebut harus memilih menu “Permintaan Akses Digital” pada halaman muka Portal Wajib Pajak.

Seorang wanita kawin yang kewajiban pajaknya digabung dengan suami dapat memiliki Akun Coretax dengan NIK-nya sendiri tanpa perlu mengubah NIK-nya sebagai NPWP. Ini berarti, istri tersebut tidak perlu menggunakan NIK suami untuk login ke Portal Wajib Pajak dan dapat menggunakan NIK-nya untuk menandatangani faktur, bukti potong, bukti pungut, atau SPT, terkait jabatannya.

Agar dapat mengakses Portal Wajib Pajak, wanita kawin yang kewajiban pajaknya digabung dengan suami tersebut dapat menggunakan dua cara. Pertama, menggunakan fitur “Daftar di sini” untuk mengakses menu Pendaftaran. Selanjutnya akan terdapat pilihan “Registration Only”/“Hanya Registrasi” dan bukan Aktivasi NIK, yakni membuat akun Portal Wajib Pajak tanpa menjadikan NIK sebagai NPWP. Pilihan ini digunakan bila NIK istri belum didaftarkan di menu Family Tax Unit (FTU) akun Portal Wajib Pajak suami. Cara kedua adalah menggunakan fitur “Permintaan Akses Digital”. Cara ini digunakan bila istri telah didaftarkan di menu *Family Tax Unit* (FTU) akun Portal Wajib Pajak suami.

Selama masa transisi ke sistem Coretax, sistem DJP Online masih dapat digunakan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan pajak untuk tahun pajak 2024 dan tahun pajak sebelumnya, termasuk untuk pelaporan SPT Tahunan 2024. Sehingga, untuk pelaporan SPT Masa Januari 2025 wajib pajak telah menggunakan sistem Coretax.

Mengingat pentingnya akses Portal Wajib Pajak ketika sistem Coretax secara resmi digunakan, wajib pajak perlu memadankan NIK-NPWP atau memperoleh NPWP dengan format 16 digit. Sebab, sistem Coretax sudah tidak mengenal NPWP 15 digit. Selanjutnya, wajib pajak harus memastikan data-data pada menu Profil DJP Online telah lengkap, terkini, dan valid. Data yang diperlukan antara lain: identitas utama, nomor ponsel kontak wajib pajak, alamat email, identitas penanggung jawab (PIC Utama) berupa email dan nomor ponsel aktif, data wajib pajak Cabang (Tempat Kegiatan Usaha/TKU), serta data dokumen pendirian wajib pajak badan.

Apabila terdapat data yang tidak sesuai, wajib pajak diharapkan segera melakukan perubahan data. Wajib pajak dapat secara mandiri mengubah data email dan nomor HP di menu Profil DJP Online. Selain itu, wajib pajak juga dapat melakukan permohonan perubahan data ke kantor pajak terdaftar atau melalui telepon Kring Pajak 1500200, serta fitur Live Chat di situs www.pajak.go.id.

Halaman Ini Dikosongkan

